

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN BEASISWA (SPP) GRATIS
BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guru Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MAHGFIRA FITRI MAULANI

10538310114

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MEI 2018**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktu akan terasa sia-sia bagi mereka yang menunda sesuatu, padahal waktu adalah keabadian bagi yang mereka mampu bergerak cepat dan berjuang untuk meraih cita-cita. Jika orang lain mampu melakukannya, kenapa saya tidak?”

(Mahgfira Fitri Maulani)

*“MAN JADDA WAJADDA
siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil
MAN SHABARA ZHAFIRA
siapa yang bersabar pasti beruntung
MAN SARA ALA DARBI WASHALA
siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan”
(Risalah Al-Islam)*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang aku sayangi.

Ayahanda tercinta

Yang rela mengorbankan jiwa raganya buat penulis.

Buat Ibunda tercinta yang selalu tabah dan tegar

Dalam mendidik dan membesarkan penulis sampai sekarang.

Kakak-kakak ku dan Keponakan ku serta Nenek tercinta

Yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa

Betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku.

*Terima kasih atas dukungan moril maupun materi untukku selama ini, sehingga
saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.*

ABSTRAK

Mahgfira Fitri Maulani, 2018, **Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan**, skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nurlina Subair dan Baharullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan,

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terkait implementasi program SPP ini. Selain wawancara, juga dilakukan observasi dan studi dokumentasi untuk mendukung data hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program penyaluran beasiswa SPP gratis sudah cukup baik. Hal ini di buktikan dengan berdasar pada observasi dan wawancara yang dilakukan, pada beberapa faktor yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen/badan pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Kata kunci: implementasi, program penyaluran beasiswa (SPP) gratis.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, shawat dan salam semoga selalu tercurah kepadarasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Pendidikan Sosoiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Limpahan rasa hormat, kasih sayang, cinta dan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Ayahanda Abidin Majid, Ibunda Agustina Rahman, ketiga kakakku Syamsul Rijal, Risna Reskiani dan Riska Wahyuni yang selama ini banyak memberikan kasih sayang, doa, semangat, saran dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh Makassar. Bapak Dr. H. Nursalam, M.Si. selaku ketua program studi Pendidikan Sosiologi Unismuh Makassar. Dr. Nurlina Subair, M.Si selaku pembimbing satu dan Dr. Baharullah, M.Pd selaku pembimbing dua yang penuh ketulusan dan keikhlasan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, arahan serta koreksi dalam menyempurnakan skripsi ini.

Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan seluruh staf Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Teman-teman seperjuangan mahasiswa kelas VII F yang selama ini telah bersama-sama berjuang menghadapi tantangan dan ujian-ujian selama kurang lebih 4 tahun ini.

Serta untuk orang-orang yang telah memberikan semangat dan motivasinya selama ini, dan semua pihak yang telah ikut serta memberikan bantuannya yang tidak bisa disebut namanya satu persatu.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya pada khususnya, dan para akademisi pada umumnya.

Makassar, Agustus 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERJANJIAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Penelitian Relevan.....	10
2. Pengertian Implementasi.....	11
3. Pengertian Beasiswa.....	13
4. Pengertian Mahasiswa	14
B. Landasan Teori.....	16
1. Kebijakan Publik.....	16

2. Implementasi Kebijakan Publi	18
A. Perkembangan Studi Implementasi	18
B. Teori-teori Implementasi	25
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokus Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Fokus Penelitian	44
E. Instrumen Penelitian	44
F. Jenis dan Sumber Data	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Teknik Analisis Data	46
I. Teknik Keabsaan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	49
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan.....	50
A. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.....	50
B. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.....	50
3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	51
4. Non Pendidikan	51
A. Administrasi Pemerintahan Daerah.....	52

B. Demografi	51
C. Geografi.....	53
D. Sosial Budaya dan Agama	56
5. Pendidikan.....	58
A. Tingkat SD (SD dan MI).....	59
E. Tingkat SLTP(SLTP dan MTs).....	60
B. Hasil dan Pembahasan.....	62
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	67
A. Ukuran Kebijakan	68
B. Tujuan Kebijakan	71
2. Sumber Daya.....	72
A. Sumber Daya Manusia	73
B. Sumber Daya Finansial.....	74
C. Sumber Daya Waktu	76
3. Karakteristik Agen/Badan Pelaksana.....	78
4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana	82
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana	85
A. Komunikasi Antarorganisasi.....	85
B. Aktivitas Pelaksana.....	91
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	93
A. Lingkungan Sosial.....	93
B. Lingkungan Politik.....	94
BAB V PENUTUP.....	95

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Amandemen IV (2002) pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pemerintah sebagai penyelenggara sistem pendidikan mempunyai peran yang besar dalam pencapaian tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlak mulia serta beriman dan bertakwa (pasal 31 ayat 3 UUD 1945). Dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sebagai generasi pelaksana pembangunan yang penuh dengan tantangan dan kompetisi.

Meskipun pendidikan sangatlah penting, namun tidak semua masyarakat mampu menempuhnya. Masalah yang sering dihadapi adalah mahalnya biaya pendidikan dan tuntutan ekonomi keluarga yang menyebabkan sebagian masyarakat mempunyai pandangan untuk segera bekerja daripada menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan Secara umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah

segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep adalah program unggulan dari pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan maksud untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa

untuk memberdayakan warga Pangkajene dan Kepulauan agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Menurut Dye (1981): ***“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”***. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam ***Public Policy-Making*** (1975) mengutarakan lebih spesifik bahwa: ***“Public policies are those policies developed by government bodies and official”***. Dalam teori manajemen, proses pembuatan kebijakan memang mengenal adanya unsur *“interest group”* dan *“pressure group”*. *Interest group* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas kebijakan, dan *pressure group* adalah kelompok yang melakukan tekanan terhadap pembuat 2 kebijakan karena berbagai alasan. Kedua kelompok ini ikut mempengaruhi seorang pejabat pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan. Pengaruh tersebut bisa baik dan bisa pula buruk dalam arti dapat memaksa pembuat kebijakan melakukan tindakan diluar hukum atau diluar garis kewajaran.

Untuk menjamin adanya *“check and balance”* dalam proses pembuatan kebijakan di lingkungan pemerintahan, seluruh warga negara dapat ikut melakukan pemantauan dan koreksi terhadap kebijakan yang tidak sesuai prosedur dalam proses pembuatannya, atau atas kebijakan yang melenceng dari kepentingan publik. Beberapa kriteria kebijakan yang baik sebagai acuan kita

semua, antara lain: kebijakan yang dirumuskan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; rumusan kebijakan jelas, mudah diimplementasikan dan mudah dikontrol; kebijakan yang dirumuskan feasible (memperhatikan dengan sumber daya yang tersedia); dan kebijakan yang dirumuskan bersifat adil, tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu.

Program ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang handal serta dapat bersaing ketika telah memasuki dunia kerja. Terlebih lagi ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah mulai diberlakukan sejak Januari 2016 lalu yang membuat terbukanya lapangan kerja baru namun berbanding lurus dengan persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat. Bukan hanya sumber daya manusia di tingkat lokal maupun nasional, bahkan hingga ke tingkat Asean. Tentu ini akan sangat mengkhawatirkan jika sumber daya manusia yang berasal dari Indonesia khususnya dari Kabupaten Pangkep hanya menjadi penonton di negeri sendiri dan tidak dapat bersaing karena terkendala pendidikan.

Program Penyaluran Beasiswa yaitu Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep dapat dikatakan sebagai 5 lanjutan dari Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) 2 (dua) semester bagi mahasiswa baru strata satu (S-1) untuk semester 1 (satu) dan 2 (dua). Dan dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep untuk semester 3 (tiga) dan 4 (empat). Dengan mengandalkan dana dari APBD yang disiapkan khusus untuk mahasiswa pada

tahun 2015 sebanyak Rp. 866.000.000,- dan tahun 2016 sebanyak Rp. 1.434.697.500,-.

Jadi yang dimaksud SPP Gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkep dalam penelitian ini adalah SPP yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep selama dua (2) semester untuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan dan telah berada pada semester tiga (3) dan empat (4) serta tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP dan surat keterangan aktif kuliah dari pihak kampus.

Dalam mengimplementasikan program ini, pemerintah Kabupaten Pangkep berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 mengenai penerimaan bantuan SPP Gratis dimana dan keputusan Bupati Pangkajene dan kepulauan tentang Beasiswa seluruh mahasiswa pangkep baik di Universitas negeri maupun swasta.

Adapun tujuan dilaksanakannya Program Bantuan SPP Gratis berdasarkan petunjuk teknisnya antara lain: Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin ilmu; Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global, dan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul.

Secara umum, selama proses implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis ini dengan dua kali penerimaan dana bantuan dimulai pada pertengahan tahun 2015 lalu, telah terlaksana dan telah dibagikan kepada mahasiswa asal Pangkep di beberapa perguruan tinggi. Namun dalam proses itu, terdapat banyak masalah yang mengakibatkan beberapa pihak menilai bahwa implementasinya kurang baik.

Tabel 1 Jumlah mahasiswa penerima dana bantuan berdasarkan tahun angkatan

No	Tahun angkatan	Tahun anggaran 2015	Tahun anggaran 2016
1	2012	38 orang	-
2	2013	724 orang	385 orang
3	2014	149 orang	490 orang
4	2015	-	76 orang
5	2016	-	145 orang
6	Lainnya	10 orang	1 orang
Jumlah Mahasiswa		921 orang	1097 orang
Jumlah Dana		866.000.000	1.399.697.500

Sumber: SK Bupati Pangkep tentang daftar penerima dana bantuan pada beberapa Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan tahun 2015 dan 2016 .

Berdasarkan tabel di atas, masalah yang terdapat dalam implementasi Program SPP Gratis ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Penerima dana bantuan SPP Gratis untuk angkatan 2013 mengalami penurunan pada gelombang kedua, dimana pada gelombang pertama (tahun 2015) penerima berjumlah 724 mahasiswa dan pada gelombang kedua (tahun 2016) hanya berjumlah 385 mahasiswa; 2) Masalah yang terkait dengan komunikasi yakni ketidakjelasan

sosialisasi dan penyampaian informasi kepada mahasiswa yang sangat kurang tentang program bantuan ini. Sehingga masih banyak mahasiswa yang kurang mengetahui tentang program ini; 3) Pada tabel di atas, ada penerima dana bantuan di kategorikan “lainnya”. Yang masuk dalam kategori tersebut adalah para penerima yang menerima dana bantuan melebihi Rp. 1.000.000,- padahal dalam petunjuk teknis disebutkan bahwa jumlah dana bantuan yang diterima oleh mahasiswa maksimal Rp. 1.000.000,-; 4) Selain itu, dalam kategori “lainnya” ada pula mahasiswa S3 yang mendapat dana bantuan, padahal dalam petunjuk teknis tidak menyebutkan bahwa S3 boleh mendapat dana bantuan. Sementara masih banyak mahasiswa S1 yang tidak menerima bantuan SPP Gratis; 5) Pada tabel tersebut, mahasiswa angkatan tahun 2016 juga telah mendapat SPP Gratis pada tahun 2016. Padahal masih menduduki semester pertama. Sementara SPP Gratis ini untuk mahasiswa yang sedang atau telah menduduki semester tiga (3) dan empat (4). Hal ini menyalahi aturan dalam petunjuk teknis yang telah dibuat; 6) Mahasiswa angkatan 2016 yang mendapat bantuan SPP Gratis merupakan mahasiswa dari dua perguruan tinggi, yakni Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Akademi Kebidanan Aisyah Pangkep. Padahal masih banyak mahasiswa asal Pangkep di kampus lainnya; 7) Pencairan dana bantuan juga lambat sehingga banyak pihak yang menilai proses implementasinya kurang baik; dan 8) Jumlah dana bantuan yang diterima maksimal Rp. 1.000.000,- /mahasiswa, padahal banyak mahasiswa yang SPP nya melebihi Rp. 1.000.000,- sehingga dirasa kurang oleh mahasiswa.

Masalah-masalah yang terdapat pada implementasi Program Bantuan SPP Gratis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini dapat diminimalisir jika implementasinya dijalankan dengan berpedoman pada teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut dengan *A model of The Policy Implementation*.

Akan tetapi proposal saya berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa lainnya. Dimana saya mengangkat judul yaitu Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan saya tertarik terhadap program beasiswa (SPP) Gratis bagi mahasiswa dengan maksud untuk mewujudkan system pendidikan sebagai pranata social yang kuat untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata social yang berwibawa untuk memperdayakan warga Pangkajene dan Kepulauan agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dan, saya akan peneliti bagaimana tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci terhadap beasiswa yang di salurkan oleh pemerintah daerah Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi program penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi program penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap dunia akademik terkhusus bagi literatur teori kebijakan publik dalam studi Pendidikan Sosiologi. Sehingga kedepannya dapat dilakukan pengembangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait implementasi Program Penyaluran Beasiswa yaitu Bantuan SPP Gratis sebagai program unggulan dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan serta dapat menjadi acuan ketika melanjutkan Program Bantuan SPP Gratis pada periode berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Relevan

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikramullah Akmal, 2016. Yang berjudul Implementasi Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Dua Semester di Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Implementasi program gratis SPP dua semester bagi mahasiswa baru strata sarjana pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan, masih jauh dari harapan apabila dilihat dari empat faktor kritis yang ditawarkan oleh Edward III sebagai teori yang digunakan dalam penelitiannya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik walau dengan beberapa kekurangannya. Namun, dilihat dari faktor komunikasi dan sumber daya belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Anugrah Supardi, 2011. Yang berjudul Studi Implementasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Tana Toraja. Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sejak diimplementasikan pada tahun 2008, program ini manfaatnya telah banyak dirasakan oleh orang tua peserta didik sekolah dasar hingga menengah sebagai target group program ini dalam meringankan beban pembayaran iuran sekolah. Dalam penelitian ini juga

diungkap bahwa walaupun telah dirasakan oleh target group, namun masih ada kekurangan yang terdapat dalam proses implementasinya seperti keterlambatan pencairan dana serta kurangnya dana dalam memenuhi kegiatan pembelajaran di sekolah yang mengakibatkan kreatifitas sekolah dalam mengembangkan sekolah menjadi tidak optimal.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Riska. 2010 implementasi kebijakan untuk pendidikan gratis di SDN Percobaan 1 dan SMP Terbuka 05 Makassar. Universitas Negeri Makassar. Yang mengungkapkan bahwa ditemukan masih awamnya pengetahuan masyarakat terhadap pengertian pendidikan gratis, sosialisasi oleh pemerintah yang masih minim menjadi penyebab masyarakat banyak yang mengira bahwa pendidikan gratis diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, namun makna sebenarnya bahwa pendidikan gratis di berikan kepada yang tidak mampu guna meringankan biaya pendidikannya. Sebenarnya pendidikan gratis bermakna bahwa pemerintah ikut melaksanakan program wajar dengan memberikan biaya operasional sekolah untuk menunjang pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

2. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. **Implementasi merupakan** penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah,

keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

a) Prof. H. Tachjan (2006)

Prof. H. Tachjan mengartikan Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.

b) Van Meter dan Van Horn

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.

c) Menurut Friedrich

Implementasi adalah Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi yaitu suatu kegiatan yang direncanakan tindakan atau dilaksanakan yang telah disusun secara cermat dan rinci untuk mencapai suatu tujuan.

3. Pengertian Beasiswa

Pengertian beasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar (KBBI, 1990). Menurut sosialisasi kelembagaan Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT, beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa/pelajar untuk keperluan biaya pendidikan/pelatihan (ORBIT, 2001). Sedangkan menurut istilah lain beasiswa merupakan tunjangan uang, diberikan kepada pelajar-pelajar, baik dengan cuma-cuma atau sebagai persekot tidak berbunga, untuk menyelesaikan pendidikannya (Poerbakawatja dan Harahap, 1982).

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Menurut Murniasih (2009) beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.

Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan

kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan.

Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. beasiswa juga banyak diberikan kepada perkelompok (group) misalnya ketika ada event perlombaan yang diadakan oleh lembaga pendidikan, dan salah satu hadiahnya adalah beasiswa.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang atau lembaga tertentu kepada pelajar/mahasiswa untuk membiayai pendidikannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemberi beasiswa.

4. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah salah satu unsur dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Secara kognitif, mahasiswa juga telah mampu berpikir berdasarkan alasan-alasan ilmiah. Apalagi kemampuan mereka untuk melihat dari perspektif yang berbeda juga muncul, sehingga tampak bahwa mereka mampu melihat persoalan secara kritis. Mereka

tidak akan memroses informasi serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Apalagi, ada beberapa mahasiswa biasanya tertarik untuk mengikuti aktivitas lain selain aktivitas perkuliahan, misalnya aktivitas keorganisasian baik di dalam maupun di luar kampus.

Mahasiswa menurut Knopfemacher (dalam Suwono, 1978) adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik & di harapkan menjadi calon – calon intelektual. Sedangkan mahasiswa menurut Sarwono (1978) adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18 – 30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.

Sedangkan pengertian mahasiswa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mahasiswa ialah pelajar perguruan tinggi. Didalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain. itulah menurut KBBI.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan mahasiswa merupakan status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon intelektual atau orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.

B. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan pada sektor publik. Sektor publik adalah porsi dari ekonomi yang mencakup seluruh level pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah. Dikecualikan dari sektor publik adalah perusahaan privat, organisasi voluntir dan rumah tangga (Bevir, 2007). Kebijakan publik merupakan instrumen pemecahan masalah-masalah sosial dan instrumen peningkatan kapasitas demokratis (Parson, 2006; Hill dan Hupe, 2002). Kebijakan publik adalah ekspresi dari arah dan tujuan-tujuan serta cara yang dikehendaki berkenaan dengan penanganan urusan-urusan publik (Kay, 2006).

Thomas Dye (1981), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah,

bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik. James E. Anderson (1979) sebagaimana dikutip oleh AG Subarsono (2010), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (sebagaimana dikutip oleh AG Subarsono, 2010). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang rasional dan diinginkan, asumsi yang realistis dan informasi yang relevan dan lengkap. Tetapi, tanpa pelaksanaan yang baik, sebuah rumusan kebijakan yang baik sekalipun hanya akan merupakan sekedar suatu dokumen yang tidak mempunyai banyak arti dalam kehidupan bermasyarakat. Kita membutuhkan kebijakan publik untuk penegakan hukum, tatanan keadilan; mencegah kerugian pada pasar yang tidak diinginkan; siklus bisnis atau krisis ekonomi; disorganisasi pasar; praktek bisnis yang wajar; perlindungan konsumen; penyediaan barang-barang publik atau barang-barang kolektif; redistribusi (Wilson, 2006).

2. Implementasi Kebijakan Publik

A. Perkembangan Studi Implementasi

Studi implementasi senantiasa terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Melacak dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya, studi implementasi telah melahirkan banyak publikasi yang berusaha untuk memahami fenomena implementasi, baik yang bersifat deskriptif maupun berupa model-model kausalitas hubungan sebab akibat antara kinerja implementasi dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Berdasarkan perspektif mereka dalam memahami implementasi, metode penelitian yang dipakai, dan produk

penelitian yang mereka hasilkan para peneliti yang berupaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga generasi yang berbeda.

Karakteristik dan pencapaian masing-masing generasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Generasi I (1970-1975): Generasi yang menggunakan Case Study

Kemunculan studi implementasi Generasi I tidak dapat dilepaskan dari kegelisahan dan kegundahan para ahli tentang realitas yang mereka hadapi dan temukan dalam kehidupan praksis kebijakan publik. Sebagai insan yang paham tentang hakekat kebijakan publik, para ilmuwan administrasi publik tersebut, percaya bahwa kebijakan publik, sebagai sebuah aksi kolektif (*collective action*), merupakan instrumen yang dianggap paling efektif untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat (masalah publik) ketika mekanisme pasar gagal memecahkan masalah bersama.

Namun demikian, alat yang dianggap paling efektif secara teoritis untuk memecahkan masalah publik tersebut dalam dunia nyata tidak selalu mampu bekerja sebagaimana diharapkan. Kenyataan yang ada sungguh sangat pahit dirasakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan telah memunculkan sebuah jurang pemisah yang lebar antara gagasan ideal tentang kondisi ideal yang ingin diraih (tujuan-tujuan kebijakan) sebagaimana ketika kebijakan tersebut dirumuskan dengan hasil-hasil yang diraih ketika kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Munculnya jurang

pemisah yang dalam antara harapan dan kenyataan tersebut memang sangat mengejutkan para ahli. Keterkejutan ini tidak lepas dari perspektif para ahli dalam memahami kebijakan publik.

Namun demikian fakta yang ada menunjukkan hal yang sebaliknya. Implementasi berbagai program pemerintah ternyata lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Upaya untuk menjelaskan berbagai kegagalan tersebut yang mendorong Pressman dan Wildavsky untuk memulai penelitian implementasi pada tahun 1970an. Apa yang dilakukan oleh dua sarjana tersebut kemudian menarik ahli-ahli yang lain untuk mengikuti jejaknya. P. deLeon dan L.deLeon (2002), sebagai sebuah kerja awal, pendekatan studi implementasi yang digunakan pada Generasi I masih terbatas pada studi kasus. Yaitu melakukan investigasi terhadap implementasi suatu kebijakan secara mendalam yang dilaksanakan pada suatu lokasi tertentu. Tujuan studi biasanya diarahkan untuk mengetahui mengapa implementasi tersebut gagal dilaksanakan. Dari serangkaian studi yang dilakukan oleh para peneliti Generasi I selanjutnya muncul istilah yang lazim disebut sebagai missing link. Konsep ini dipakai untuk menjelaskan kegagalan pemerintah dalam mentransformasikan niat baik mereka (*good intentions*) menjadi *good policy*.

Maknanya, niat baik yang ditunjukkan pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang positif ketika pemerintah tidak mampu merancang dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Setelah membuat deskripsi tentang kegagalan implementasi dan mengidentifikasi

faktor yang menjadi penyebab kegagalan, para peneliti kemudian memberikan preskripsi (resep) masing-masing tentang bagaimana mengatasi permasalahan implementasi suatu kebijakan. Sayangnya “resep-resep” yang dirumuskan tersebut belum mampu menghasilkan apa yang disebut sebagai teori umum tentang implementasi, yaitu penjelasan hubungan sebab akibat tentang kegagalan atau keberhasilan implementasi yang dapat diterapkan di mana saja.

Tidak dapat dipungkiri, meskipun Generasi I memiliki berbagai kelemahan, akan tetapi kerja akademik mereka menjadi pondasi penting bagi generasi-generasi berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi suatu kebijakan.

b. Generasi II (1975-1980): Building Model

Secara umum, berdasarkan cara para peneliti Generasi II memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu para pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

a) Pendekatan Top-Down

Pendekatan yang bersifat *top-down* dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti Generasi II yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Menggunakan bahasa Sabatier (1986), pendekatan *top-down* dilakukan oleh para peneliti dengan langkah sebagai berikut: “*they started with*

policy decision (usually statute) and examined the extent to which its legally-mandated objectives were achieved over time and why”.

Pendekatan ini sering kali juga disebut ‘*policy-centered*’ karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak.

Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti Generasi II yang menggunakan pendekatan *top-down* biasanya adalah sebagai berikut:

1. Memilih kebijakan yang akan dikaji;
2. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan;
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan;
4. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan Standard Operating Procedure yang ada);
5. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran;
6. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran yang mereka terima.

Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan. Dari pemahaman itu, para peneliti Generasi II kemudian muncul dengan rekomendasi tentang bagaimana cara terbaik untuk dapat mencapai berbagai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam model-model yang mereka hasilkan dari studi yang mereka lakukan. Pakar yang berusaha membuat model implementasi ideal dengan menggunakan pendekatan top-down ini adalah Van Meter dan Van Horn's (1975)

b) Pendekatan Bottom-Up

Pendekatan bottom-up ini dipelopori oleh Elmore (1978,1979), Lipsky (1971), Berman (1978) dan Hjern, Hanf, serta Porter (1978). Para pengikut pendekatan bottom-up menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: birokrat pada level bawah (street level buraucrat) dan kelompok sasaran kebijakan (target group).

Agus. E.P dan Ratih R.S (2015) mengatakan bahwa adapun langkah-langkah pendekatan penelitian yang dianjurkan oleh para bottom-upers adalah sebagai berikut:

1. Memetakan stakeholder (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah;
2. Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi;

3. Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya;
4. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama;
5. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (para policy maker)

c. Generasi III (1980): *more scientific approach?*

Dari sisi cara melakukan penelitian, para peneliti Generasi III sepakat untuk melanjutkan dukungannya terhadap pendekatan bottom-up yang telah dirintis oleh para peneliti Generasi II, namun disamping itu mereka juga berusaha mengembangkan studi implementasi ke arah yang lebih scientific. Goggin et.al (1990), mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan cara menganjurkan penggunaan prosedur ilmiah yang lebih baku. Dalam bukunya tersebut mereka mengatakan bahwa agar penelitian implementasi makin diakui kualitas kadar keilmiahannya maka peneliti perlu: (i) memperjelas konsep-konsep yang digunakan, terutama konsep implementasi itu sendiri; (ii) memperbanyak kasus yang akan distudi sehingga memberi ruang yang lebih baik untuk menjelaskan hubungan kausal guna menjelaskan fenomena implementasi; (iii) membangun model dan indikator yang akan dipakai untuk menguji hipotesis; (iv) berani melakukan perbaikan terhadap persoalan penggunaan konsep dan pengukuran yang dihadapi oleh para peneliti generasi sebelumnya.

Gagasan Goggin dan teman-temannya tersebut secara nyata menunjukkan bahwa para peneliti Generasi III makin mendorong penelitian implementasi untuk mengadopsi penelitian positivistik (kuantitatif) dengan makin meningkatkan

kualitas indikator untuk melakukan pengukuran, baik terhadap variabel dependent (kinerja implementasi) maupun variabel prediktor (faktor-faktor yang menjelaskan kinerja implementasi).

B. Teori - Teori Implementasi

1. Teori yang disebut sebagai "*The top down approach*" dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978; 1986)

Menurut kedua pakar ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Beberapa hambatan saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator. Sebab, hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksananya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik. Adapula kemungkinan lain bahwa hambatan-hambatan implementasi itu bersifat politis. Dalam artian, baik kebijakan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak diterima atau tidak disepakati oleh stakeholder-nya. Kendala-kendala semacam ini cukup jelas dan mendasar sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh para administrator mengatasinya. Dalam hubungan ini, yang mungkin dapat dilakukan oleh para administrator, terutama dalam kapasitasnya sebagai penasehat, ialah mengingatkan

kemungkinan-kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang-matang sewaktu merumuskan kebijakan.

- b. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama yang telah disebutkan di atas. Dalam artian, tak jarang ia muncul di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Jadi, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Alasan yang biasanya dikemukakan bahwa pembuat kebijakan terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya, para politisi kadangkala hanya peduli dengan pencapaian tujuan-tujuan (politik), namun kurang peduli dengan penyediaan sarana yang diperlukan untuk mencapainya, sehingga tindakan-tindakan pembatasan atau pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program, karena sumber-sumber yang tidak memadai. Masalah lain yang biasanya terjadi, apabila dana khusus untuk membiayai pelaksanaan program sudah tersedia semacam proyek INPRES, tetapi harus dapat dihabiskan dalam tempo yang amat singkat, kadang lebih cepat dari kemampuan program atau proyek untuk secara efektif menyerapnya.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua di atas.

Dalam artian, di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan di lain pihak pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan.

- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif, bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara sembrono, melainkan karena kebijakan itu sendiri memang kurang baik. Penyebab dari semua ini, kalau mau dicari, tidak lain karena kebijakan itu telah didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya, peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya, dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Dalam hubungan ini, Pressman dan Wildavsky (1973) memperingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang, maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan. Sebab, semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubungnya, dan semakin menjadi kompleks implementasinya.

- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (*single agency*), untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain. Kalaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini harus pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman dan kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Yang penting, keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dimana pelaksanaan program dapat dimonitor.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk memerinci dan menyusun dalam urutan-urutan

yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat.

- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan, guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (*unitary administrative system*) seperti halnya satuan tentara yang besar tapi hanya memiliki satu satuan komando tanpa kompartementalisasi atau konflik di dalamnya.
 - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna, persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan, dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain, baik yang berasal dari kalangan dalam badan/organisasi sendiri maupun yang berasal dari luar, yang kesepakatan dan kerja samanya amat diperlukan demi berhasilnya misi program (dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, 2014).
2. Teori yang disebut *A Frame for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi

tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan :
 - a) Kesukaran-kesukaran teknis
 - b) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c) Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
 - d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya :
 - a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b) Digunakannya teori kausal yang memadai
 - c) Ketepatan alokasi sumber dana
 - d) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana
 - e) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
 - f) Rekrutmen pejabat pelaksana
 - g) Akses formal pihak luar
- c. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut:
 - a) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
 - b) Dukungan publik
 - c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok

- d) Dukungan dari pejabat atasan
- e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

3. Teori Sosiologi Murni

Ilmu Murni adalah ilmu yang membahas atau mendalami ilmu itu sendiri. Dalam pendidikan ilmu murni akan tampak dari adanya usaha untuk membahas teori-teori pendidikan secara dalam. Ilmu Pengetahuan Murni berfokus kepada teori yang ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru.

Ilmu Pengetahuan Murni berfokus kepada teori yang ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru. Misalnya, penelitian mata manusia. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I. Mendefinisikan bahwa sosiologi sebagai ilmu murni (*pure science*) maksudnya ialah; ilmu yang dipergunakan penelitiannya hanya untuk kepentingan ilmu itu sendiri, tidak dimaksudkan untuk kepentingan sehari-hari, contoh: ilmu Kimia, Matematika, Ilmu Pasti dan lain sebagainya. Menurut Henslin bahwa sosiologi murni ditujukan pada sesama sosiolog sebagai khalayak sasarannya dan produk yang dihasilkan berupa pengetahuan.

4. Teori yang disebut dengan *A model of The Policy*

Implementation dari Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975) Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van meter dan Carl Van Horn (1975) disebut dengan *A model of The Policy Implementation*. Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pilek untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

c. Karakteristik Agen/ Badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- b) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-untai dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- d) Vitalitas suatu organisasi;
- e) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

d. Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk

melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan – bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Van Meter dan Van Horn (1975) menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-rujukan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya. Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar pemerinah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang

paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

5. Teori yang diberi label “RE, dkk” dari Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O’Porter (1981).

Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka 36 tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi terget atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik

secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM) 5. Teori tentang Model Implementasi dari George C. Edwards Model implementasi kebijakan yang bersifat top down menurut pandangan Edwards III (1980) implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Keempat variabel tersebut antara lain:

1. Komunikasi

Pada variabel ini diperlukan adanya tiga hal, yaitu: (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula; (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

4. Struktur birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hierarchis yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi.

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit

dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

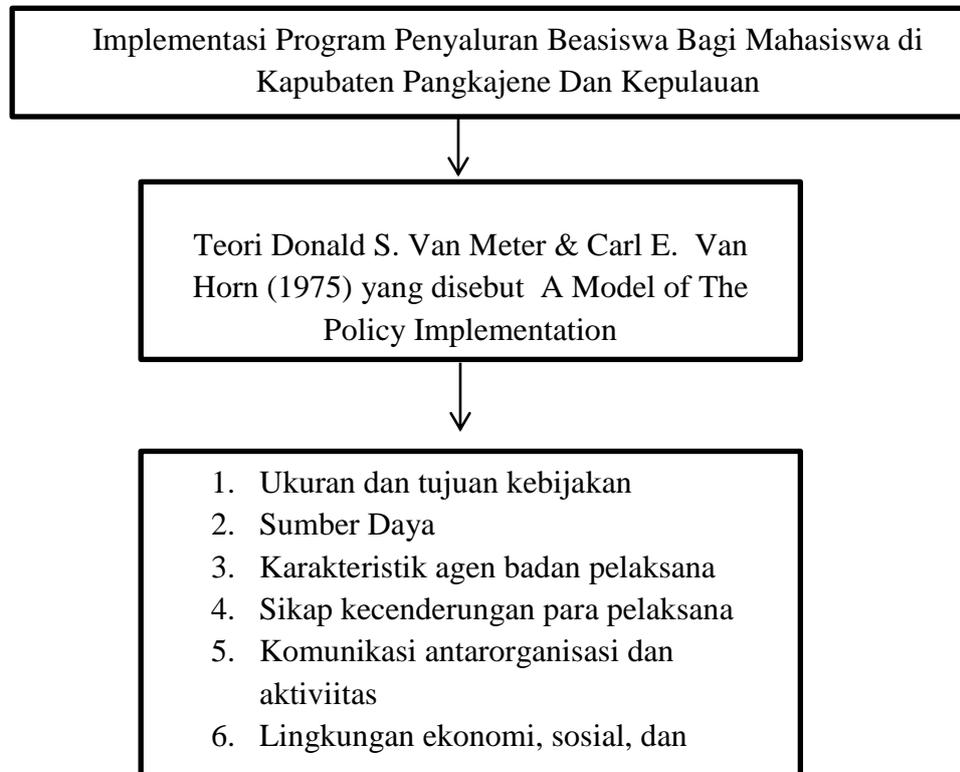
C. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi program penyaluran beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang baik sangat penting dan diperlukan. Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada proses implementasi Program Bantuan SPP Gratis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekiranya dapat diminimalisir jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975) dengan enam (6) variabel yang terdapat pada teorinya, yakni:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen/badan pelaksana
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada penelitian sebelumnya yang relevan, belum ada yang menggunakan teori dari Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975) pada program pendidikan gratis pada level Perguruan Tinggi dan peneliti menganggap teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn lebih relevan digunakan untuk masalah implementasi Program Bantuan SPP Gratis ini.

Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Gambar 01. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J Moleong 2002:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan catatan yang berisi tentang perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif ungkapan atau catatan orang itu sendiri.

Menurut Sugiyono (2008), penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode pengumpulan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam mengenai suatu masalah atau gejala guna mendapat pengertian tentang sebanyak mungkin sifat masalah atau gejala itu.

Penelitian dengan jenis deskriptif berarti adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Kutipan dan data ini didapatkan melalui catatan di lapangan, foto, rekaman wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

Dengan penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus. Menurut Yin (1997) metode studi kasus adalah strategi yang lebih cocok

bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” dan “*why*”, dimana penelitian studi kasus dibuat guna dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan awal yaitu pertanyaan seperti “mengapa” atau “bagaimana” pada fokus penelitian sehingga akan mempermudah peneliti ketahap pengumpulan data dan analisis data. Menurut Yin (1997;46) karakteristik umum desain penelitian berperan sebagai latar untuk memikirkan desain yang spesifik bagi studi kasus.

Karena pendapat tersebut di atas sesuai dengan apa yang di inginkan oleh peneliti untuk memaparkan Beasiswa di daerah Pangkajene dan kepulauan di implementasikan sebagai program Bupati, maka tipe penelitian kualitatif penulis rasa tepat digunakan untuk tipe penelitian pada penelitian ini. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif peneliti berusaha mengetahui secara mendetail bagaimana implementasi terhadap mahasiswa di daerah Pangkajene dan Kepulauan.

B. Lokus Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan dengan alasan bahwa semua proses dalam pengimplementasian Program Bantuan SPP Gratis diserahkan kepada OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun masih banyak masalah-masalah dalam prosesnya sehingga dianggap belum mencerminkan implementasi yang baik.

C. Informan Penelitian

Sesuai permasalahan penelitian maka informan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Staf pengelola Program Bantuan SPP Gratis
3. Staf bagian kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi di Pangkep
4. Beberapa Mahasiswa Penerima Program Bantuan SPP Gratis.

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi program penyaluran beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, penulis sendiri yang bertindak sebagai instrument (*human instrument*).

Untuk memperoleh hasil penelitian yang cermat dan valid serta memudahkan penelitian maka perlu menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara (daftar pertanyaan), pedoman observasi, pensil/pulpen dan catatan peneliti yang berfungsi sebagai alat pengumpul data serta alat pemotret.

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen yang mendukung pernyataan informan.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber tidak tertulis berupa informasi atau data lapangan yang berkenaan

dengan masalah penelitian yang umumnya ditemukan melalui wawancara mendalam (depth interview) dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berkenaan dengan dokumen, peraturan dan perundang-undangan atau data lain yang sifatnya tertulis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi langsung kepada kantor pengelola SPP Gratis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bank Sulselbar dan mengunjungi beberapa perguruan tinggi sebagai stakeholders penyelenggaraan Program Bantuan SPP Gratis.

2. Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog atau diskusi dengan informan terpilih yang dianggap banyak mengetahui permasalahan penelitian. Informan yang saya wawancarai terdapat 10 informan yang saya wawancara.

3. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Penulis tidak menunggu sampai seluruh data terkumpul baru melakukan analisis sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Kegiatan peneliti kualitatif dituntut untuk lebih banyak memverifikasi dan mengelompokkan data agar sedapat mungkin dapat membantu mempercepat penulisan laporan hasil penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah mendisplaykan data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut. Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpul dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.
3. Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

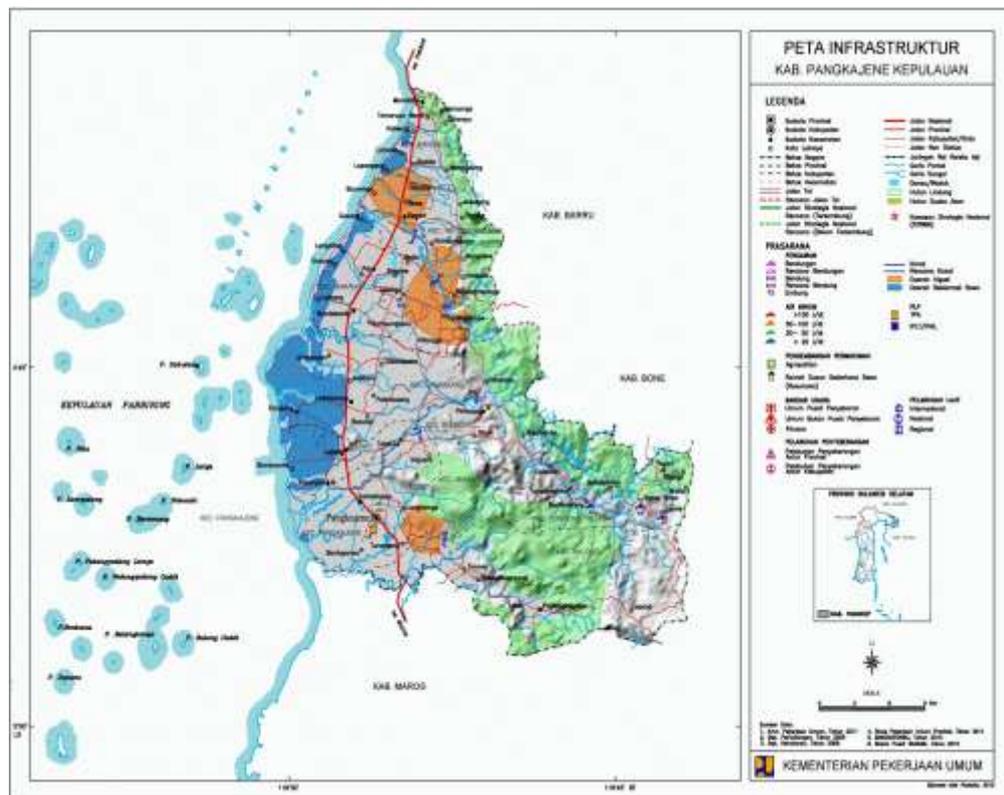
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pangkep



Sumber : <http://peta-kota.blogspot.com/2017/03/peta-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan.html>

Berdasarkan Peta 4.1 dapat dikemukakan bahwa batas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Maros, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan

a. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah “Mewujudkan Layanan Pendidikan Prima yang Bermutu”.

Visi yang dimaksud mengandung arti bahwa pembangunan Pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang sangat mendasar dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat pendidikan dapat menjadi ukuran tingkat kemampuan berpikir seseorang. Bahkan tingkat kerugian suatu daerah/ negara sangat erat kaitannya dengan masalah mutu pendidikan yang diselenggarakan.

b. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

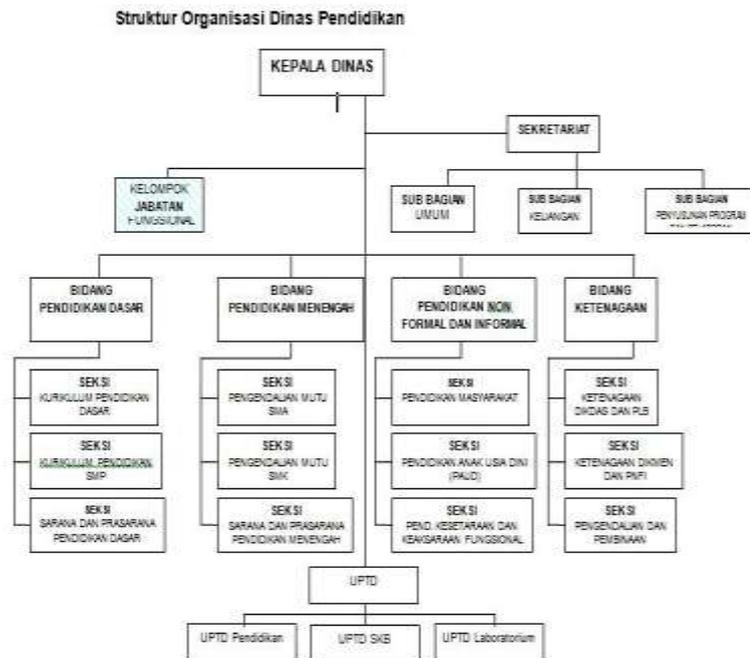
Dalam Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan;
- b. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan kependidikan;
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda;

d. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan



Sumber : <https://disdikpangkep.blogspot.com/p/struktur-organisasi-dinas-pendidikan- kab.html>

4. Nonpendidikan

Keadaan nonpendidikan dimasukkan dalam Profil Pendidikan karena selama ini terdapat kesan bahwa faktor lingkungan sering kurang diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga timbul berbagai masalah, antara lain: (1) input pendidikan kurang dikelola secara optimal dan (2) output pendidikan dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan sehingga belum mampu menunjang pembangunan nasional. Untuk itu, masalah nonpendidikan perlu dikaitkan dengan pendidikan yang ada.

a. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 1 kabupaten dan terdiri atas 13 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 103 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya 1112,9 km² (lihat tabel 4.1)

Tabel 4.1 Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017/2018

No.	Variabel	Jumlah
1.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1
2.	Kecamatan	133
2.	Desa/Kelurahan	103
3.	Desa/Kelurahan tertinggal	–
4.	Luas wilayah	1112,9 km ²

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018

b. Demografi

Berdasarkan undang-undang, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk bagi sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat

mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 323.597 orang. Dari jumlah tersebut, 38.257 berusia 7-12 tahun, 18.862 berusia 13-15 tahun, dan 18.347 berusia 16-18 tahun.

Tabel 4.2 Keadaan penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah

No.	Kategori Usia Sekolah	Jumlah
1.	SD (7-12 tahun)	38.257 orang
2.	SLTP (13-15 tahun)	18.862 orang
3.	SMA (16-18 tahun)	18.347 orang
	Total	75.466 orang

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep tahun 2018

Sementara jumlah penduduk dari tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.3 Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Komponen	Jumlah
1.	Tidak/ belum pernah sekolah	7.769 orang
2.	Tamat SD	38.965 orang
3.	Tamat SLTP	15.840 orang
4.	Tamat SMU	18.216 orang

5. Tamat SMK	12.538 orang
6. Tamat Diploma	1.648 orang
7. Tamat Sarjana	15.027 orang
8. Total	134.420 orang

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep tahun 2018

Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci menjadi 8 kategori dapat digambarkan sebagai berikut: (1) tidak/belum pernah sekolah sebanyak 38.965 orang, (2) tidak/belum tamat SD sebanyak 24.417 orang, (3) tamat SD sebanyak 18.216 orang, (4) tamat SLTP sebanyak 15. 840 orang, (5) tamat SMU sebanyak 18.216 orang, (6) tamat SMK sebanyak 12. 538 orang, (7) tamat Diploma I, II, dan III sebanyak 1.648, (8) tamat sarjana sebanyak 15.027 orang. Sementara jumlah angkatan kerja dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.4 Keadaan penduduk berdasarkan kategori pekerjaan

No. Komponen	Jumlah
1. Bekerja	125.933 orang
2. Mencari pekerjaan	9.487 orang
3. Bersekolah	20.307 orang
4. Mengurus Rumah Tangga	63.260 orang
5. Lainnya	9.557 orang
Total	228.544 orang

Sumber Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep tahun 2018

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017/2018 dapat diuraikan sebagai berikut: (1) jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 125.933 orang dan (2) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 9.487 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas: (1) jumlah penduduk bersekolah 20.307 orang, (2) jumlah penduduk mengurus rumah tangga 63.260 orang dan (3) lain-lain 9.557 orang, sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 93.124 orang.

c. Geografi

Faktor geografi yang dimaksud antara lain mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersediannya SDA merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan: (1) rencana penentuan lokasi sekolah; (2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; (3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; (4) rencana penempatan guru; (5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku serta peralatan pendidikan lainnya.

SDA baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut (jika ada) merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA

secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan

d. Sosial Budaya dan Agama

Tabel 4.5 Keadaan sosial budaya dan agama tahun 2016/2017

No.	Variabel	Jumlah
1.	Penduduk	323.957
	a. Islam	321.439
	b. Protestan	1.879
	c. Katolik	253
	d. Hindu	3
	e. Budha	23
2.	Tempat ibadah	553
	a. Masjid/musholla	549
	b. Gereja Kristen	4
	c. Gereja Katolik	0
	d. Pura	0
	e. Vihara	0
3.	Puskesmas induk	23

4. Puskesmas pembantu	23
5. Rumah sakit	1
6. Balai Pengobatan	475

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018

Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 321.439 orang, Protestan sebanyak 1.879 orang, Katolik 253 orang, Hindu 71 sebanyak 3 orang, dan Budha sebanyak 23 orang. Untuk mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama tersebut didukung oleh 549 masjid dan musholla, 4 gereja, sementara tidak ada pura dan vihara.

Keadaan kesehatan masyarakat dapat digambarkan bahwa gizi masyarakat didukung oleh puskesmas induk sebanyak 23 buah dan puskesmas pembantu 23 buah, dan rumah sakit sebanyak 1 buah. Jumlah puskesmas terhadap kecamatan ada sampai 3. Demikian juga halnya dengan jumlah rumah sakit terhadap Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ada 1 maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki rumah sakit sudah mencukupi.

5. Pendidikan

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan cukup mengembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan,

pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SLTP, serta tingkat SM.

a. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017/2018, jumlah SD dan MI sebanyak 311, dimana siswa baru tingkat I sebanyak 6.581, siswa seluruhnya sebesar 39.988, dan lulusan sebesar 6.866. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 1.938, dengan rincian 552 memiliki kondisi baik, 1.186 kondisi rusak ringan, dan 200 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebanyak 2.126. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 3.243 dan guru yang layak mengajar untuk SD+MI sebanyak 86,62%. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 213, lapangan olahraga sebanyak 321 dan ruang UKS sebanyak 76 (lihat table 4.6).

Tabel 4.6 Data pokok SD dan MI Tahun 2017/2018

No.	Komponen	SD	MI	SD+MI
1.	Sekolah	301	10	311
2.	Siswa baru Tk I	6.366	215	6581
3.	Siswa	38.716	1272	39988

4.	Lulusan	6.700	166	6866
5.	Ruang kelas	1.879	59	1938
	a. baik	510	42	552
	b. rusak ringan	1.175	11	1186
	c. rusak berat	194	6	200
6.	Kelas	2.056	70	2126
7.	Guru	3.104	139	3243
	Layak mengajar	86,89	8,58	86,62
8.	Fasilitas			
	a. perpustakaan	208	5	213
	b. lapangan olahraga	301	20	321
	c. UKS	70	6	76

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018

b. Tingkat SLTP (SLTP dan MTs)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017/2018, jumlah SLTP dan MTs sebanyak 109, siswa baru tingkat I sebanyak 6.217, siswa seluruhnya sebanyak 18.199, dan lulusan sebanyak 757. 74 Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 757, dengan rincian 330 memiliki kondisi baik, 420 dengan kondisi rusak ringan, dan 7 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebanyak 731. Guru yang mengajar di SLTP dan MTs sebanyak 1771 di antaranya dan yang layak mengajar 96,05 %. Untuk menunjang

kegiatan belajar mengajar di SLTP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 58, lapangan olahraga sebanyak 107 ruang UKS sebanyak 39 dan laboratorium sebanyak 274 (lihat tabel 4.7).

Tabel 4.7 Data pokok SLTP dan MTs Tahun 2017/2018

No.	Komponen	SLTP	MTs	SLTP+MTs
1.	Sekolah	89	20	109
2.	Siswa baru tk 1	5370	847	6217
3.	Siswa	15827	2372	18199
4.	Lulusan	5068	645	5713
5.	Ruang kelas	670	87	757
	a. baik	254	76	330
	b. rusak ringan	413	7	420
	c. rusak berat	3	4	7
6.	Kelas	637	94	731
7.	Guru	1368	403	1771
	Layak mengajar	96,78	93,55	96,05
8.	Fasilitas			
	a. perpustakaan	49	9	58
	b. lapangan olahraga	87	20	107
	c. UKS	29	10	39

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018

B. Hasil dan Pembahasan

Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 12 ayat (1) ditekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diatur oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang mengarah pada pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga ke Perguruan Tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan tentunya akan memperbesar peluang dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Dengan melanjutkan program Gratis SPP di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mahasiswa baru semester satu (I) dan dua(II), Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan dana bantuan SPP Gratis bagi mahasiswa Pangkep semester I(Satu) dan sampai semester VIII(Delapan). Jadi dalam penelitian ini, SPP Gratis yang dimaksudkan adalah SPP Gratis selama 8 semester, untuk mahasiswa asal Kabupaten Pangkep yang kuliah pada Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan.

Program Bantuan SPP Gratis oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Petunjuk teknis

tersebut mengacu pada petunjuk teknis yang digunakan pada tingkat provinsi dengan beberapa perubahan. Program Bantuan SPP Gratis ini tidak lepas dari nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Rektor/Direktur Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan. Serta memperhatikan data nama-nama penerima bantuan yang terlampir dalam beberapa surat keputusan bupati, antara lain:

- 1) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 116 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Politeknik Pertanian Pangkep dan Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 2) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 204 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 3) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 205 tahun 2015 tentang Bantuan Fasilitas Pendidikan Pemuda Mengikuti Pendidikan pada Universitas Negeri Makassar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 4) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 206 tahun 2015 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

- 5) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 221 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- 6) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 534 tahun 2016 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.
- 7) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 535 tahun 2016 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.
- 8) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 625 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.
- 9) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 626 tahun 2016 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk Semester III dan IV Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.

10) Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 653 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016.

Penyelenggaraan program Gratis SPP bagi mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan Tahun Akademik 2014/2015 bermaksud untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga Pangkajene dan Kepulauan agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin ilmu;
- 3) Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul.

Program Bantuan SPP Gratis ini diselenggarakan sejak tahun 2015 yang diperuntukkan untuk mahasiswa semeseter 1 dan semeseter . Jadi setiap mahasiswa berhak mendapat dana bantuan sebanyak 8 kali. Secara total jumlah penerima bantuan memang mengalami peningkatan setiap

tahun 2015 sebanyak 921 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 1.097 orang.

Sasaran dari program ini adalah untuk mahasiswa S1 maupun Diploma semester 1 sampai semester 8, namun penerima untuk mahasiswa angkatan 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016. Artinya terdapat banyak mahasiswa yang hanya sekali menerima dana bantuan. Tentu hal ini menjadi tidak adil bagi mereka yang cuma sekali mendapat dana bantuan. Hal ini disebabkan karena adanya mahasiswa yang mengundurkan diri dari suatu perguruan tinggi, alasan lainnya adalah karena lamanya proses implementasi program ini mulai dari pendataan mahasiswa hingga pencairan dana bantuan yang menyebabkan mahasiswa D3 pada tahun 2016 sudah tak lagi mendaftar untuk mendapat dana bantuan karena mahasiswa lebih fokus pada tugas akhir (skripsi), dan tentunya ada informasi yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga tidak mendaftar sebagai calon penerima dana bantuan pada tahun 2016.

Kemudian ada juga beberapa penerima dana bantuan yang bukan mahasiswa Strata 1 (S1) dan mahasiswa D3, bahkan dana bantuan yang mereka terima hingga Rp. 5.000.000,-. Selain itu, ada pula mahasiswa yang mendapat dana bantuan hingga Rp. 20.000.000,- padahal mahasiswa S1 maupun D3 hanya mendapat dana bantuan maksimal Rp. 1.000.000,- sementara banyak mahasiswa yang harus membayar SPP lebih dari Rp. 1.000.000,-. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan

sasaran awal program Bantuan SPP Gratis ini yakni mahasiswa S1/ D3 semester 3 dan 4.

Sementara pada tahun 2016, ada angkatan 2016 yang telah menerima dana bantuan, padahal seharusnya mereka belum memenuhi syarat untuk mendapat dana bantuan.

Dari penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa Program Bantuan SPP Gratis ini masih belum efektif dengan kata lain belum berjalan sebagaimana seharusnya dan manfaatnya belum dirasakan oleh seluruh mahasiswa asal Pangkep yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi Program Bantuan SPP Gratis dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yang disebut dengan A model of The Policy Implementation. Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, antara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu: pertama mungkin disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan kebijakan.

a. Ukuran Kebijakan

1. Seberapa banyak kelompok sasaran yang telah dijangkau Ibu Fatmawati selaku salah satu penanggung jawab program SPP Gratis ini mengatakan bahwa:

“Jika membicarakan berhasilnya program ini, saya belum dapat mengatakan iya atau tidak. Saya hanya bisa mengukur bahwa dana yang disiapkan oleh pemerintah sudah tersentuh ke mahasiswa. Tujuan program ini kan salah satunya untuk meringankan beban orang tua, kita tidak tahu apakah mahasiswa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia menerima bantuan. Jadi kita tidak tahu apakah betul meringankan beban orang tua.”

(Wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa salah satu indikator telah tercapai yakni dana bantuan telah sampai kepada kelompok sasaran yakni mahasiswa. Namun berdasarkan observasi dan studi dokumentasi yang telah dilakukan, masih banyak mahasiswa yang tidak menerima dan bantuan padahal memenuhi kategori sebagai salah satu calon penerima dana bantuan. Memang program ini telah sampai kepada kelompok sasaran, tetapi masih belum menyeluruh ke semua kelompok sasaran yang berhak menerima.

2. Seberapa mudah pelayanan dapat dijangkau oleh kelompok sasaran Ibu Fatmawati selaku salah satu penanggung jawab program SPP Gratis ini mengatakan bahwa:

“Sangat mudah apalagi banyak mahasiswa yang datang untuk menanyakan sampai kapan batas pengumpulan proposal dan apa-apa yang dibutuhkan”

(Wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, untuk mahasiswa yang kuliah di Pangkep, lokasi pelayanan dapat dikatakan terjangkau terlebih lagi lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep berada di tengah tengah Kabupaten. Tapi untuk yang kuliah di luar daerah Kabupaten Pangkep, hal tersebut tergolong sulit untuk dijangkau karena lokasi yang cukup jauh untuk ke kantor Dinas Pendidikan. Sementara tidak ada kontak yang dapat dihubungi untuk menanyakan tentang program SPP Gratis ini, jadi untuk mendapatkan informasi mahasiswa harus menanyakan secara langsung kepada pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.

3. Apakah keluaran kebijakan telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau tidak?

Untuk indikator yang terakhir dan yang paling penting, juga tidak terpenuhi dengan baik karena berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku salah satu penanggung jawab program ini juga tidak mengetahui apakah program ini telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa untuk membayar SPP atau malah disalahgunakan sehingga tidak

meringankan beban orang tua. Terlebih lagi tidak ada pelaporan penggunaan dana bantuan oleh mahasiswa kepada Dinas Pendidikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan sebagian besar mahasiswa tidak menggunakan dana yang telah diterima untuk membayar SPP karena dana bantuan yang diberikan tidak cair pada saat pembayaran SPP akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi dana bantuannya habis untuk hal yang lainnya.

Tidak adanya pelaporan penggunaan dana bantuan juga bertentangan dengan apa yang tertera di petunjuk teknis yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program ini. Padahal dalam petunjuk teknis dengan sangat jelas diuraikan dalam bab monitoring dan pelaporan bahwa perguruan tinggi harus melaporkan penyaluran dan penggunaan dana bantuan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan tembusan kepada pihak pengelola program.

Tidak adanya pelaporan dari pihak kampus dibenarkan oleh pernyataan pegawai kemahasiswaan di Akademi Kebidanan Aisyah yang mengatakan bahwa:

“tidak ada bentuk pelaporan penggunaan dana dari pihak kampus kepada dinas pendidikan, karena mahasiswa sendiri yang mengambil bantuannya jadi pihak kampus hanya diberi nama-nama penerima bantuan yang kemudian kami simpan sebagai arsip, tidak ada arahan untuk pelaporan dana bantuan.”

(Wawancara tanggal 26 Juli 2018)

Dan pernyataan Ibu Fatmawati yang mengatakan bahwa:

“Dulu pernah ditanyakan oleh BPK bahwa kenapa tidak ada pelaporan dari pihak kampus maupun mahasiswa mengenai penggunaan dananya karena mereka langsung menerima dana di bank dan tidak kembali untuk melaporkan.”

(Wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas bahwa ada tahapan yang tidak dilakukan dalam proses implementasi program ini, yakni pelaporan dana bantuan. Jadi Dinas Pendidikan selaku pihak pengelola program Bantuan SPP Gratis hanya mengimplementasikan program ini sampai pada proses pencairan dana yang dibantu oleh pihak Bank BNI. Setelah itu tidak ada lagi arahan untuk pelaporan dana bantuan.

b. Tujuan Kebijakan

1. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi

Ibu Hasna selaku salah satu staf pelaksana mengatakan bahwa:

“Untuk meringankan beban orang tua, kemudian yang kedua supaya mengurangi angka putus sekolah karena dari 4000 siswa SMA yang tamat, biasanya hanya 700 yang lanjut. Makanya pemerintah memberikan bantuan agar mahasiswa banyak yang melanjutkan pendidikannya.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa telah dipahami oleh staf pelaksana inti dari program ini yakni mengurangi angka putus sekolah bagi lulusan SMA. Tapi berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan bahwa SPP Gratis diberikan kepada mahasiswa ketika mereka telah membayar SPP sebelumnya dengan menggunakan dana

pribadi. Jadi bagi lulusan SMA yang tidak mampu membayar SPP untuk kuliah tetap tidak menerima dana bantuan. Walaupun belum secara keseluruhan, tetapi setidaknya kesempatan untuk lanjut ke perguruan tinggi bagi lulusan SMA telah ada peningkatan dengan adanya program ini.

2. Meningkatkan kualitas SDM

Kepala Bidang Pendidikan Menengah mengatakan bahwa:

“Pak Bupati memberikan bantuan ini beliau mengingikan bahwa anak-anak Kabupaten Pangkep yang akan datang dari segi SDMnya dapat meningkat, yang kurang berminat lanjut di perguruan tinggi dengan cara memberikan bantuan dapat termotivasi untuk kuliah agar dapat bersaing dan kedepannya akan lahir professor-profesor dari Kabupaten Pangkep.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Dengan adanya kesempatan belajar di perguruan tinggi tentunya akan membuat kualitas SDM asal Pangkep juga dapat meningkat sesuai dengan apa yang diharapkan dari Program SPP Gratis ini. Tujuan-tujuan yang diharapkan dengan adanya program ini telah dipahami dengan baik oleh seluruh staf pelaksana hingga ke pimpinannya, menjadikan nilai positif tersendiri untuk Program SPP Gratis ini.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya yang diminta dan

dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

a. Sumber Daya Manusia

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan. Mengenai sumber daya manusia atau dalam hal ini para pegawai yang melaksanakan progam ini, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah mengatakan bahwa:

“Para pegawai yang melaksanakan program ini semuanya lulusan sarjana jadi saya yakin sudah pasti memiliki kemampuan.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam hal sumber daya manusia tidak memiliki kendala karena para staf pegawai yang menjalankan program ini telah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup. Hal tersebut diperkuat oleh observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan, ketika ada mahasiswa yang datang, langsung dilayani oleh stafpegawai sesuai dengan keluhan dari mahasiswa dan diberi solusi jika ada masalah yang terkait dengan berkas proposal calon penerima dana bantuan.

Selain dari wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan observasi yang dilakukan. Pernyataan mengenai sumber daya manusia

yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup juga ditunjang dengan studi dokumentasi yang dilakukan dengan melihat nama pegawai beserta pangkat atau golongannya pada absensi harian Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Dimana pada daftar tersebut, staf pegawai pada Bidang Pendidikan Menengah sebagian besar merupakan lulusan sarjana Strata-1, bahkan salah satu penanggung jawab program ini yakni Ibu Hasnawati merupakan lulusan S-2.

b. Sumber Daya Finansial

Diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pilek untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Dalam mengimplementasikan program ini, dana yang tersedia tidak pernah mengalami kekurangan. Pada tahun 2015 jumlah anggaran yang disiapkan dari APBD untuk mahasiswa berjumlah Rp. 866.000.000,- dan pada tahun 2016 berjumlah Rp.1.434.697.500,-. Namun, berdasarkan data pada tahun 2015, terdapat 10 orang penerima bantuan yang mendapat dana melebihi jumlah maksimal yang dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tiga orang penerima dengan jumlah dana yang diterima sebanyak
Rp. 2.500.000,-
- 2) Satu orang penerima dengan jumlah dana yang diterimasebanyak

Rp. 5.000.000,-

- 3) Lima orang penerima dengan jumlah dana yang diterima sebanyak

Rp. 15.000.000,-

- 4) Satu orang penerima dengan jumlah dana yang diterima sebanyak

Rp. 20.000.000,-

Dan pada tahun 2016, ada satu orang penerima yang kuliah di Cina mendapat dana bantuan sebanyak Rp. 20.000.000,-.

Berdasarkan data di atas, pihak pelaksana program dalam hal ini Ibu Hasnawati mengatakan bahwa:

“Ada lima orang wartawan yang mengambil pendidikan profesi di UNM mendapat dana bantuan karena ada kerjasama dengan bupati. Selain itu, ada mahasiswa yang kuliah di Cina dan ada juga mahasiswa S3 yang mendapat dana bantuan, mereka semua memasukkan proposal yang ditujukan langsung kepada Bupati. Memang dulu banyak dana sedangkan mahasiswa penerima kurang jadi disetujui oleh Bupati.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa:

“ada mahasiswa yang lulus di cina tapi terkendala oleh biaya jadi bermohon ke dinas pendidikan, kemudian kita arahkan untuk bermohon ke Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati menyetujui jika masih ada dana, maka nya kami proses karena masih ada dana 20 juta.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekurangan dana untuk mahasiswa dalam melaksanakan program ini, tapi ada beberapa penerima dana bantuan yang tidak sesuai dengan petunjuk

teknis dan jumlah dana yang diterima juga melebihi jumlah maksimal dana yang diterima oleh mahasiswa lainnya. Padahal masih banyak mahasiswa S-1 yang tidak mendapat dana bantuan. Akan tetapi, hal itu dapat dibenarkan karena telah disetujui sebelumnya oleh Bupati Pangkep.

Namun, masalah yang muncul kemudian adalah adanya ketidakadilan terhadap mahasiswa yang hanya sekali menerima dana bantuan padahal mereka masih berhak untuk mendapat dana bantuan. Terlebih lagi mereka lebih memenuhi kriteria untuk menerima dana bantuan. Dan pada tahun 2016 dimana banyak mahasiswa angkatan 2013 yang sudah tidak mendapat dana bantuan, terdapat kelebihan dana bantuan sebanyak Rp. 35.000.000,-. Karena pada tahun 2016, jumlah dana yang dianggarkan sebanyak Rp. 1.434.697.500,- sedangkan jumlah dana yang tersalurkan kepada mahasiswa sebanyak Rp. 1.399.697.500,-.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, penerima yang bukan merupakan mahasiswa S-1 tidak diketahui oleh mahasiswa lainnya dan informasi mengenai mahasiswa selain S-1 boleh mendapat dana bantuan tapi harus mengajukan permohonan kepada Bupati Pangkep juga tidak disampaikan kepada mahasiswa S-2 atau S-3 lainnya yang juga berasal dari Pangkep.

c. Sumber Daya Waktu

Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur

dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Ketepatan waktu dalam implementasi program SPP Gratis ini menjadi hal yang penting agar dapat tepat penggunaannya oleh mahasiswa yakni membayar SPP.

Ibu Hasnawati mengatakan bahwa:

“Waktu pelaksanaan program ini memang lambat karena biasanya ketika kita mau minta tanda tangan MoU kepada pihak kampus, yang bersangkutan tidak ada dan harus menunggu lagi sampai yang bersangkutan hadir. Mungkin karena tidak adanya batasan waktu yang diberikan makanya prosesnya menjadi lambat.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah bahwa:

“Ada tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak serta merta langsung cair. Ada banyak prosedur yang harus dilalui. Waktu penerimaan proposal, para pegawai sampai begadang di kantor untuk memilah dan mengelompokkan setiap angkatan dan mengelompokkan sesuai jumlah SPP. Untuk meminta tanda tangan setiap kampus dan Pak Bupati juga tidak mudah dan tidak langsung bisa selesai.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan tersebut dibenarkan oleh staf pelaksana dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar dan bukan merupakan kesalahan dari pihak pelaksana. Melainkan proses penandatanganan MoU oleh setiap kampus yang menjadi pemicu utama keterlambatan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan yang juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan adalah tidak adanya dorongan yang kuat dari semua stakeholder untuk mempercepat proses implementasi program ini.

Seperti halnya pihak kampus yang lambat dalam proses penandatanganan MOU. Selain pihak kampus, mahasiswa calon penerima dana bantuan juga tergolong lambat dalam memasukkan proposal calon penerima dana bantuan. Padahal jika semua mahasiswa bergerak cepat untuk memasukkan proposal tentu proses pencairan dana bantuan juga dapat dipercepat.

3. Karakteristik agen/badan pelaksanaan

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan van Horn (1975) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unti dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;

- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif)
- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

M. Arief Hamsah, S.sos, M. Adm. SDA selaku Kepala Bidang Pendidikan

Sekolah Menengah mengatakan bahwa:

“Kita sudah bagi tim untuk mengkoordinasi siapa yang bertanggung jawab terhadap mahasiswa untuk setiap angkatan. Jadi profesional lah dalam mengelola”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Fatmawati selaku salah satu pegawai yang melaksanakan, bahwa:

“Semua pegawai di bagian pendidikan menengah turut ikut andil dalam melaksanakan program spp gratis yang dibagi kedalam beberapa tim, dan turun ke lapangan untuk menyampaikan informasi maupun dalam hal penandatanganan MoU setiap kampus. Dan ada satu orang yang bertindak sebagai operator”

(Wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam mengelola program ini pihak pelaksana bekerja secara tim yang dibagi menjadi 2-3 orang dalam satu tim, dimana Kepala Bidang Pendidikan Menengah sebagai pimpinan dari bidang ini

memberikan pengawasan kepada anggota-anggotanya selama menjalankan program ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, tidak ada struktur organisasi yang membagi tugas setiap pegawai dalam menjalankan program ini. Namun, tetap ada pembagian siapa yang bertanggung jawab untuk mahasiswa angkatan 2013, 2014, 2015 hingga angkatan 2016. Jadi mereka kemudian mengarahkan anggota yang lain untuk bertindak, baik ketika menyampaikan informasi maupun ketika membawa MoU ke setiap kampus yang mahasiswanya mendapat dana bantuan. Dan ketika ada mahasiswa yang bermasalah dengan berkasnya atau telah mengumpulkan proposal tapi namanya tidak ada dalam daftar penerima, maka akan diarahkan ke pegawai yang bertugas sebagai operator untuk mengecek nama mahasiswa tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar penerima jika telah memasukkan proposal.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep hanya bertugas mengawasi dan kadang-kadang menanyakan progres dari implementasi program SPP Gratis ini kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Untuk dukungan dari pihak legislatif dan eksekutif, Kepala Bidang Pendidikan Menengah mengatakan bahwa:

“Tetap didukung. Bahkan marah Pak Bupati jika tidak didukung oleh DPR. Jadi ada dua yakni pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan legislatif yaitu DPR. Pak Bupati selalu mengatakan jangan persulit program saya.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Selain itu beliau juga menambahkan bahwa:

“Selalu ada pengawasan dari staf khusus bupati yang menanyakan progres dari implementasi program ini. Staf khusus mendukung dan ikut membantu jika mengalami kesulitan. Dan saya juga selalu menanyakan progres implementasi program ini.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Dari hasil wawancara di atas, jelas bahwa pihak legislatif dan eksekutif turut mendukung program SPP Gratis ini. Bahkan pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Pangkep mengutus staf khususnya untuk turut membantu dalam implementasi program ini jika pihak pelaksana mengalami kesulitan. Pihak pelaksana juga tak hentinya menjalin komunikasi dengan staf khusus tersebut. Hal itu dibuktikan dengan observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan pada saat wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah beliau mendapat panggilan telepon dari staf khusus tersebut.

Ini menandakan dukungan yang penuh dari pihak Bupati Pangkep dalam mengimplementasikan program SPP Gratis ini. Sementara wawancara yang dilakukan dengan beberapa mahasiswa penerima dana bantuan, mereka mengatakan bahwa: Jummiati Ramli jurusan sastra inggris UMI:

“pelayanannya ramah, baik serta terstruktur setiap angkatan beda yang melayani”

(wawancara tanggal 30 Juli 2018)

Sri Islamiyah Putri jurusan Pendidikan Matematika UNISMUH:

“pelayanan yang diberikan pegawai Dinas Pendidikan lumayan bagus”

(wawancara tanggal 30 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak mahasiswa juga mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada mereka sudah lumayan baik dan terstruktur dan telah ada pembagian tugas untuk masing-masing pegawai. Karena setiap angkatan beda pegawai yang melayani. Jadi walaupun tidak ada struktur organisasi yang jelas mengenai pembagian tugas setiap pegawai. Tapi telah ada penanggung jawab yang ditunjuk untuk setiap angkatan mahasiswa, jadi merekalah yang kemudian memberikan arahan dan jika ada yang tidak diketahui, maka akan langsung ditanyakan kepada Kepala Bidang Pendidikan menengah. Jadi saling mendukung satu sama lain.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya. Menurut Van Meter dan Van Horn

(1975), ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan- kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan – bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Van Meter dan Van Horn (1975) menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

1. Kognisi/pemahaman tentang kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah yang mengatakan bahwa:

“Mereka semua sangat memahami apa yang menjadi keinginan Pak Bupati dengan dilaksanakannya program ini.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Hasil wawancara di atas dibuktikan dengan observasi yang telah dilakukan selama proses penelitian dimana para pegawai sangat memahami program ini. Terutama tujuan dilaksanakannya. Kemudian mahasiswa yang datang untuk menanyakan informasi mengenai program ini pun langsung dilayani sesuai dengan apa yang ditanyakan dan tak perlu menunggu lama.

2. Tanggapan kebijakan

Untuk tanggapan pegawai terhadap kebijakan ini, Kepala Bidang Pendidikan Menengah menambahkan bahwa:

“Program ini kan dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah artinya dalam bidang saya semua bertanggung jawab dalam dalam menyukseskan program ini, dan tentunya semua staf mendukung program ini.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2017)

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa program ini tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana program baik dari pimpinan hingga ke staff yang menjalankan program tersebut. Jadi semua mendukung program ini dan berada dalam satu kesepahaman yakni untuk menyukseskan implementasi program ini.

3. Intensitas tanggapan

Sementara intensitas tanggapan staf pelaksana terhadap program ini berdasarkan wawancara terhadap Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mengatakan bahwa:

“Dulu waktu pengumpulan proposal, pegawai-pegawai sampai lembur di kantor untuk memisahkan proposal mahasiswa berdasarkan angkatannya dan jumlah SPPnya”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2017)

Wawancara terhadap Kepala Bidang Pendidikan Menengah menandakan bahwa cukup tingginya dukungan yang diberikan oleh setiap pegawai dalam mengimplementasikan program SPP Gratis ini hingga harus lembur di kantor untuk mengurus berkas proposal calon penerima dana bantuan yang dikumpul oleh mahasiswa.

Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan, terlihat bahwa pihak pelaksana program juga sangat lugas dalam melayani mahasiswa yang datang untuk mengurus berkas yang diperlukan. Jadi semakin menguatkan statement bahwa intensitas dukungan para staf pelaksana terhadap program ini cukup tinggi.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

a. Komunikasi antarorganisasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran- ukuran dan tujuan- tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan- tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

1. Komunikasi dengan para pelaksana Ibu Wahyuni selaku pegawai di bagian kemahasiswaan Politeknik Negeri Pangkep mengatakan bahwa:

“Komunikasi awal yang dilakukan melalui surat yang dibawa oleh pihak dinas pendidikan. Jadi kita mengirim semua nama anak Pangkep dengan melampirkan data-data yang dibutuhkan, dalam proses ini pun tak lepas dari peran aktif dari Kerukunan Mahasiswa Pangkep (KMP).”

(Wawancara tanggal 25 Juli 2018)

Ibu Hasnawati selaku salah satu pelaksana program mengatakan bahwa:

“Untuk menyampaikan informasi mengenai SPP Gratis, kita mengirim surat ke setiap kampus bahwa ada beasiswa dari Bupati, selain ke setiap kampus kita juga mengirim surat ke kantor-kantor lurah atau desa di Kabupaten Pangkep”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jalur komunikasi dalam implementasi program ini dimulai ketika pihak pelaksana program mengirim surat edaran ke setiap kampus dan setiap kantor lurah dan desa, lalu kemudian pihak kampus yang menyampaikan ke mahasiswa. Dan dari mahasiswa informasi akan disampaikan secara luas ke mahasiswa lain melalui sosial media yang mereka miliki. Tapi tetap

saja ada mahasiswa asal Pangkep yang tidak tahu mengenai program ini. Berdasarkan observasi yang dilakukan, informasi tersebut biasanya kurang jelas bagi mahasiswa sehingga ada beberapa mahasiswa yang kemudian mendatangi Dinas Pendidikan

Kabupaten Pangkep untuk menanyakan secara langsung mengenai program SPP Gratis ini. Sulkifli, S.Pi, M. Si selaku Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan Politeknik Negeri Pangkep mengatakan bahwa:

“SPP gratis, sesuai dengan yang dibayarkan oleh mahasiswa, ada memang yang menjadi SPP itu kelas khusus seperti kedokteran. Berdasarkan kriteria pemberian. Kan namanya SPP gratis jadi yang dibayarkan adalah SPP itu, berapapun SPPnya akan dibayarkan.”

(Wawancara tanggal 26 Juli 2018)

Berdasarkan penuturan beliau, ada ketidakcocokan informasi mengenai SPP Gratis ini dengan pihak pelaksana program dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan. Padahal pihak kampus merupakan jalur komunikasi awal yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Jadi ketepatan komunikasi dengan para pelaksana belum cukup baik karena masih banyak mahasiswa yang mendatangi Dinas Pendidikan untuk menanyakan kejelasan program SPP Gratis ini.

2. Konsistensi atau keseragaman informasi yang dikomunikasikan

Pegawai bagian kemahasiswaan Akademi Kebidanan Aisyah mengatakan bahwa:

“Informasi yang diberikan oleh pihak dinas pendidikan tidak ada yang berubah, biasanya hanya berupa penambahan informasi.”

(Wawancara tanggal 26 Juli 2018)

“Pegawai bagian kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mengatakan bahwa: “tidak ada informasi yang berubah dari Dinas Pendidikan sejak awal informasinya disampaikan kepada kami melalui surat”

(Wawancara tanggal 26 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pegawai di bagian kemahasiswaan pada dua kampus di Kabupaten Pangkep, tidak ada perubahan informasi yang disampaikan kepada pihak kampus mengenai proses implementasi dari program SPP ini. Jadi semuanya telah disampaikan dengan jelas pada awal penyampaian informasi tentang program ini. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswa penerima dana bantuan, mereka mengatakan bahwa :

Hartina, Jurusan Penjaskesrek UNM, mengatakan bahwa :

“informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada mahasiswa tidak jelas apalagi berkas-berkas yang di kumpul dan informasinya dari mulut ke mulut, biasanya berbeda dari mulut A sama mulut B”

(wawancara tanggal 27 Agustus 2018)

Muh. Faisal jurusan Ilmu Pemerintahan (Ketua IPPM Kord. Unismuh) mengatakan bahwa

“konsistensi informasi yang diberikan kepada mahasiswa kurang memuaskan karena adanya informasi yang berubah-ubah dari Dinas Pendidikan selaku pihak penyelenggara program ini”

(wawancara tanggal 27 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima dana bantuan, mereka masih memperlmasalahkan informasi yang kurang jelas dari pihak pelaksana program, dan bahkan informasi tersebut kadang berubah-ubah. Perubahan informasi tersebut terjadi ketika ada mahasiswa yang mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep lalu menanyakan informasi mengenai program ini sebagai salah satu contoh yakni kepastian pencairan dana bantuan, lalu pihak penyelenggara mengatakan bulan depan, tapi bulan depannya dana bantuan belum juga cair dan informasinya akan berubah lagi. Jadi mahasiswa merasa bingung dengan hal tersebut.

Ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak pelaksana juga berdampak pada banyaknya mahasiswa yang tidak lagi mendapat dana bantuan pada tahun 2016, padahal mereka sempat mendapatkan dana bantuan pada tahun 2015. Mengenai hal tersebut, Ibu Hasnawati mengatakan bahwa:

“Banyak mahasiswa yang menerima pada tahun 2015 tapi tidak menerima pada tahun 2016 mungkin karena mereka menganggap bahwa namanya sudah ada di dinas pendidikan dan tidak perlu memasukkan proposal, padahal harus memasukkan proposal makanya banyak yang tidak menerima.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hasna, beliau membenarkan bahwa ada informasi yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga menyebabkan banyak mahasiswa yang hanya mendapat dana bantuan sekali. Wawancara di atas dikuatkan oleh observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat dari beberapa mahasiswa yang Cuma sekali mendapat dana bantuan. Mereka tidak

mengetahui bahwa ketika kita ingin mendapat dana bantuan untuk kedua kalinya, maka kita harus memasukkan proposal calon penerima dana bantuan kembali ke Dinas Pendidikan. Jadi informasi yang kurang jelas bagi mahasiswa membuat kesempatan untuk mendapatkan dana bantuan yang kedua kalinya menjadi hilang. Jalur komunikasi yang erputus antara pihak pelaksana dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah mahasiswa menjadi pemicu utama ketidaktahuan mahasiswa yang hanya sekali mendapat dana bantuan tersebut.

Bahkan ada mahasiswa yang tidak pernah mendapat dana bantuan sama sekali seperti yang dialami oleh saudari Nur Ilmiah Ridwan, seorang mahasiswi Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berdasarkan penuturan dari saudari Nur Ilmiah, dia telah memasukkan proposal ke Dinas Pendidikan sebanyak dua kali. Namun, tidak pernah mendapat dana bantuan karena ketika ada daftar nama-nama penerima dana bantuan, namanya tidak pernah tercantum didalamnya.

Ibu Hasna selaku staf pelaksana sekaligus satu penanggung jawab program ini mengatakan bahwa:

“Tidak tau kenapa bisa. Ini kan begini, ketika masuk tahap verifikasi, jadi data nama-nama mahasiswa kita kasi ke Perguruan Tinggi. Jika kasi masuk proposal tapi namanya tidak tercantum maka disuruh ke Diknas melapor sebelum SK penerima ditandatangani oleh Pak Bupati. Jadi kemungkinan mahasiswa yang memasukkan proposal tapi tidak mendapat dana bantuan, mereka tidak melapor atau mengecek namanya di Diknas.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Penuturan dari Ibu Hasnawati mengenai kasus yang dialami oleh saudari Nur Ilmiah Ridwan, dikuatkan dengan beberapa informasi yang diberikan oleh mahasiswa bahwa mereka tidak mendapat informasi dari pihak kampus mengenai daftar penerima dana bantuan yang harus di cek terlebih dahulu di Dinas Pendidikan sebelum dana bantuan dicairkan. Jadi ketika namanya tidak ada dalam daftar tersebut dan tidak melapor ke Dinas Pendidikan. Maka hanguslah kesempatan untuk mendapat dana bantuan karena SK Bupati mengenai daftar penerima telah keluar dan namanya tidak tercantum didalamnya. Sekali lagi, hal tersebut menjadi bukti bahwa ada informasi yang tidak sampai kepada mahasiswa. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana tidak berjalan dengan baik.

b. Aktivitas Pelaksana

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Dari segi aktivitas pelaksana, tidak ada bantuan teknis maupun sanksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Tetapi, nasihat-nasihat yang dapat mendorong motivasi para staf pelaksana tetapi diberikan.

Hal ini sesuai dengan wawancara terhadap Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah yang mengatakan bahwa:

“Saya selalu katakan ke teman-teman bahwa jangan main-main karena program ini harus kita sukseskan, selalu diawasi bagaimana percepatannya, selalu tanya sudah berapa jumlah mahasiswa, sudah berapa jumlah MoU yang kembali dari PT.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Kemudian beliau menambahkan:

“Untuk bantuan teknis tidak ada, mereka itu lebih pintar dari saya apalagi soal komputer tapi saya ini kan sebagai manajer tugas saya bagaimana memberdayakan mereka.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kepala Bidang Pendidikan Menengah mengakui bahwa tidak ada bantuan teknis yang diberikan kepada stafnya tapi tetap mengawasi aktivitas dari para stafnya. Observasi yang dilakukan mendukung hasil wawancara di atas, bahwa bantuan teknis yang diberikan oleh pimpinan baik itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep maupun Kepala Bidang Pendidikan Menengah kepada para staf pelaksana memang tidak ada, karena beliau tidak selalu berada di kantor Dinas Pendidikan, hanya beberapa waktu saja beliau berada di kantor jadi tidak dapat melihat keseluruhan aktivitas pelaksana. Tetapi, ketika berada di kantor Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah tidak lupa menanyakan progres dari implementasi program SPP Gratis ini. Serta tak lupa memberikan nasihat-nasihat yang dapat memacu semangat para staf untuk mengimplementasikan program ini.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Dalam penelitian ini, lingkungan ekonomi tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap proses implementasi program ini. Jadi tidak dibahas dalam penelitian ini.

a. Lingkungan Sosial

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat. Terkhusus dalam penelitian ini adalah orang tua mahasiswa. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatmawati yang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa orang tua yang pergi ke dinas pendidikan untuk menanyakan tentang kejelasan program Bantuan SPP Gratis ini kepada pelaksana dan mereka mendapat informasi tersebut berdasarkan pengumuman yang di dengar melalui masjid.”

(Wawancara tanggal 23 Juli 2018)

Jadi hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan social dalam hal ini orang tua mahasiswa turut mendorong keberhasilan implementasi program ini karena orang tua yang langsung mendatangi pihak pelaksana. Observasi yang dilakukan kemudian menguatkan hasil wawancara di atas. Ketika berada di Dinas

Pendidikan, ada beberapa orang tua yang mendatangi staf pelaksana program untuk 109 menanyakan kejelasan program SPP Gratis ini dan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan syarat sebagai salah satu calon penerima dana bantuan. Tetapi orang tua mahasiswa yang datang kebanyakan mereka yang berprofesi sebagai pegawai. Jadi tidak semua orang tua mahasiswa datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.

b. Lingkungan Politik

Salah satu yang termasuk lingkungan politik adalah instansi pemerintah. Berdasarkan penuturan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang mengatakan bahwa:

“Ada staf khusus bupati yang selalu menanyakan progress implmentasi program ini. Staf khusus mendukung dan ikut membantu jika kami mengalami kesulitan.”

(Wawancara tanggal 24 Juli 2018)

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik juga turut mendorong keberhasilan program ini. Karena program tersebut merupakan janji Bupati saat kampanye, maka ada staf khusus yang selalu mengawal proses implementasi program ini dan juga ikut membantu jika staf pelaksana mengalami kesulitan seperti ketika ada berkas yang perlu ditandatangani oleh Bupati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara umum implementasi program bantuan SPP Gratis di Kabupaten Pangkep sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan pada beberapa faktor yakni:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, tujuan kebijakan sudah dipahami dengan baik oleh staf pelaksana namun belum ada ukuran atau indikator yang jelas untuk menilai proses implementasi program ini.
2. Sumber daya, jika dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah cukup baik. Namun, dari sumber daya waktu, masih perlu perbaikan karena banyak mahasiswa yang menilai waktu pelaksanaan program ini terlalu lama.
3. Karakteristik agen/badan pelaksana, untuk faktor ini juga sudah cukup baik karena dalam menjalankan program ini, pembagian tugas untuk masing-masing pegawai telah ada walaupun tidak dimuat dalam struktur organisasi. Staf pelaksana juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk DPR.
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana, dari segi ini sudah baik karena para pelaksana tidak ada yang menolak program ini dan menunjukkan dukungannya terhadap program ini dengan ikut sertanya seluruh

pegawai. Dinas Pendidikan di bagian Dikmen selaku pelaksana program.

Jadi semua punya andil dalam pelaksanaan program ini.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, faktor ini merupakan yang paling krusial dalam implementasi ini. Banyak mahasiswa yang merasa informasinya kurang jelas dan informasi dari Dinas Pendidikan tidak merata ke semua mahasiswa
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial dan politik berpengaruh baik terhadap proses implementasi program ini. Tetapi lingkungan ekonomi tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap proses implementasi program ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibuat indikator-indikator yang dapat dijadikan dasar untuk melihat keberhasilan program ini. Agar kedepannya dapat dilakukan perubahan untuk membuat membuat program ini dilaksanakan dengan lebih baik lagi.
2. Sebaiknya waktu pencairan dana bantuan dapat dipercepat, agar mahasiswa tidak perlu menunggu terlalu lama. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang para pimpinan Perguruan Tinggi untuk hadir dalam suatu tempat dan membicarakan program ini dirangkaikan dengan penandatanganan MoU. Sehingga dalam penandatanganan MoU tidak menyita banyak waktu.

3. Sebaiknya dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa perlu memanfaatkan teknologi sekarang terutama sosial media karena penyebaran informasi lebih cepat pada zaman sekarang melalui social media. Pemanfaatan sosial media dapat dilakukan dengan pembuatan group atau suatu laman khusus membahas mengenai program ini dan didalamnya para mahasiswa dapat bertanya dan ada dari pihak penyelenggara yang memberikan jawaban kepada mahasiswa. Itu lebih efektif jika dibandingkan dengan setiap mahasiswa yang ingin bertanya harus datang langsung ke Dinas Pendidikan. Selain itu, informasi yang diberikan kepada mahasiswa harus lebih jelas lagi dan tidak berubah-ubah seiring berjalannya program ini.
4. Pihak penyelenggara dapat bekerja sama dengan seluruh pihak kampus mengenai data-data mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep serta diberi wewenang untuk merekomendasikan mahasiswa yang berasal dari Pangkep sehingga seluruh mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep dapat menikmati program ini.
5. Dinas Pendidikan juga dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi mengenai data mahasiswa penerima dana bantuan jadi tidak perlu melakukan pendataan ulang, barulah mereka yang tidak mendapat dana bantuan di tingkat Provinsi kemudian mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yayasan Amal Abadi Beasiswa-Orang Tua Bimbingan Terpadu (YAAB-ORBIT), (2001). *Kumpulan Materi : Sosiolisasi Kelembagaan Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT Tahun 2001*. Jakarta: Yayasan ORBIT.

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung* :Alfabeta.

Anderson, James A. 1975. *Public Policy Making. Basic Concept in Political Sciences*. New York : Praeger Uniiversity Series.

Anderson, James A. 1978. *Public Policy Making*. New York : Ho it, Rinehart and Winston, 2nd ed.

Bevir, M.2007. *Encyclopedia of Governmance*. California: Saga Publications, Inc.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elesx Media Komputindo.

Dye, Thomas R., 1981 *Understanding Publik Policy*. Sixth Edition New JerseyPrensite Hall Inc.

Edward III. George C 1980. *Implementing Public Policy Washington DC*: Congressional Quarterly Press.

Goggin, Malcolm L. 1990 . *Implementation Theory and Practice toward a third generation*. Scott Foresman/Little Brown Higher education I llinois.

Poerbakawatja, Soegarda dan H.A.H Harahap (1982). *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.

Walgito, Bimo (1994). *Psikologi Sosiol (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi

Hogwood, Brian W and Gun, Lewis A. 1984. *Policy Analysis for the Real Word* . USA : Oxford University Press.

Kay, A. 2006. *The Dynamics of Publicity: Theory and Evidence*. Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing, Inc.

Mulyadi, Deddy 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nawawi, Ismail. 2009 *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

Person, . 2006 *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan Jakarta*: Prenada Media Group.

Sabatter, Paul 1986, "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy*.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial Bandung*: PT Refrika Aditama.

Tachjan, 2006 . *Implementasi Kebijakan Publik Bandung* Penerbit AIPI

Van Meter, D. S., & Van Hom, C. E 1975. "The Policy Implementation ProcessA Conceptual Framework". *Administration and Society*.

Wilson, Charter A. 2006 *Public Policy: Continuty and Change New York* : McGraw-Hill.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media

Pressindo.

Skripsi:

Ikramullah Akmal, Muhammad, 2016. Implementasi Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Dua Semester di Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin. Skripsi tidak diterbitkan.

Rahma Diani, Nur, 2017. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Enrekang. Universitas Hasanuddin.

Lainnya :

Petunjuk teknis Program Bantuan SPP Gratis bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2016 115.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 116 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Politeknik Pertanian Pangkep dan Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 204 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 205 tahun 2015 tentang Bantuan Fasilitas Pendidikan Pemuda Mengikuti Pendidikan pada Universitas Negeri Makassar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 206 tahun 2015 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 221 tahun 2015 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 534 tahun 2016 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 .

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 535 tahun 2016 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 625 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 626 tahun 2016 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Gratis Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk Semester III dan IV Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 116

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 653 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Absensi Harian Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep rofil Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2017 .

<http://1ptk.blogspot.co.id/2016/01/kebijakan-publik-bidang-pendidikan-di.html>,
diakses 2018 -02-04 pukul 19:30 WITA

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>,
diakses 2018-02-04 pukul 20:40 WITA

<http://www.pengertianku.net/2014/11/kenali-pengertian-mahasiswa-dan-menurut-para-ahli.html>,di akses 2018-02-10 pukul 10:30 WITA

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>, diakses 2018-02-16 pukul 20:59 WITA

<http://www.disdikpangkep.com/p/struktur-organisasi-dinas-pendidikan-kab/>, diakses
2018-7-25 pukul 23:45 WITA

<http://peta-kota.blogspot.com/2017/03/peta-kabupaten-pangkajene-dankepuluan.html>, diakses
2018-7-25 pukul 22:45 WITA

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Foto bangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep



Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen)



Wawancara dengan Ibu Fatmawati sebagai salah satu staf pegawai di bagian Dikmen



Wawancara dengan Ibu Hasna sebagai salah satu staf pegawai di bagian Dikmen



Kesibukan Mahasiswa(i) mencari informasi tentang beasiswa



Kesibukan pegawai dalam melayani mahasiswa(i)



Kesibukan pegawai dalam melayani mahasiswa(i)



Kesibukan pegawai dalam melayani mahasiswa(i)



Keadaan pegawai jika sepi mahasiswa(i)

PROFIL INFORMAN & WAWANCARA

1. Informan I

Nama : M.Arief Hamsah, S.Sos., M.Adm

Umur : 53 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Matahari

Pak Arief merupakan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah dan beliau merupakan atasan yang mengatur jalannya program beasiswa (SPP) gratis.

Wawancara :

- 1) Apa tujuan program penyaluran Beasiswa (SPP) gratis ini terhadap mahasiswa di Pangkep?

Jawab :

“Pak Bupati memberikan bantuan ini beliau menginginkan bahwa anak-anak Kabupaten Paangkep yang akan datang dari segi SDMnya dapat meningkat, yang kurang berminat lanjut di perguruan tinggi dengan cara memberikan bantuan dapat termotivasi untuk kuliah agar dapat bersaing dan kedepannya akan lahir professor-professor dari kabupaten Pangkep”

- 2) Bagaimana cara implementasi atau knierja kebijakan publik program penyaluran Beasiswa (SPP) gratis ini?

Jawab :

“Para pengawai yang melaksanakan program ini semuanya lulusan sarjana jadi saya yakin sudah pasti memiliki kemampuan.”

- 3) Bagaimana ketepatan waktu dalam implementasi program (SPP) gratis sehingga dapat tepat penggunaannya oleh mahasiswa yakni membayar (SPP)?

Jawab :

“Ada tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak serta langsung cair. Ada banyak prosedur yang harus di lalui. Waktu penerimaan proposal, para pegawai sampai begadang di kantor untuk memilah dan mengelompokkan setiap angkatan dan mengelompokkan sesuai jumlah SPP. Untuk meminta tanda tangan setiap kampus dan Pak Bupati juga tidak mudah dan tidak langsung bisa selesai.”

4) Bagaimana struktur pengurusan badan-badan pelaksana yaitu pegawai dalam mengurus program beasiswa (SPP) gratis ini?

Jawab :

“Kita sudah bagi tim untuk mengkoordinasi siapa yang bertanggung jawab terhadap mahasiswa untuk setiap angkatan. Jadi professional lah dalam mengelola”

Beliau juga mengatakan,

“Semua pegawai dibagian pendidikan menengah turut ikut andil dalam melaksanakan program SPP gratis yang dibagi kedalam beberapa tim, dan turun ke lapangan untuk menyampaikan informasi maupun dalam hal penandatanganan MoU setiap kampus. Dan ada yang bertindak sebagai operator dan saya bertugas mengawasi dan kadang-kadang saya menanyakan progress dari implementasi program SPP Gratis ini.”

5) Bagaimana dukungan dari pihak legislatif dan eksekutif dan adakah pengawasan terhadap program penyaluran beasiswa (SPP) gratis ini?

Jawab :

“Tetap didukung. Bahkan marah Pak Bupati jika tidak didukung oleh DPR. Jadi ada dua yakni pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan legislatif yaitu DPR. Pak Bupati selalu mengatakan jangan persullit program saya dan selalu ada pengawasan dari staf khusus bupati yang menanyakan progress

dari implementasi program ini. Staf khusus mendukung dan ikut membantu jika mengalami kesulitan. Dan saya juga selalu menanyakan progress implementasi program ini.”

- 6) Bagaimana kognisi/pemahaman tentang kebijakan program penyaluran beasiswa (SPP) gratis di Kabupaten Pangkep?

Jawab :

“Mereka semua sangat memahami apa yang menjadi ke inginan Pak Bupati dengan dilaksanakan program ini, program ini dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah artinya dalam bidang saya semua bertanggung jawab dalam menyukseskan program ini, dan tentunya semua staf mendukung program ini.”

- 7) Bagaimana intensitas tanggapan staf pelaksana terhadap program ini ?

Jawab :

“Dulu waktu pengumpulan proposal, pegawai-pegawai sampai lembur di kantor untuk memisahkan proposal mahasiswa berdasarkan angkatannya dan jumlah SPPnya dan saya selalu katakan ke teman-teman bahwa jangan main-main karena program ini harus kita sukseskan, selalu diawasi bagaimana percepatannya , selalu Tanya sudah berapa jumlah mahasiswa, sudah berapa jumlah mahasiswa, sudah berapa jumlah MoU yang kembali dari PT dan untuk bantuan teknis tidak ada, mereka itu lebih pintar dari segi apalagi soal computer tapi saya ini kan sebagai manajer tugas saya bagaimana memberdayakan mereka.”

- 8) Apakah lingkungan politik atau instansi pemerintah selalu pengawasi program implementasi program penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa di kabupaten Pangkep?

Jawab :

“Ada staf khusus bupati yang selalu menanyakan progres implementasi program ini. Staf khusus mendukung dan ikut membantu jika kami mengalami kesulitan.”

2. Informan II

Nama : Fatmawati, S.Pd

Umur : 47 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Bungoro

Ibu Fatmawa merupakan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pendidikan Sekolah Menengah dan sebagai salah satu yang mengurus program beasiswa (SPP) gratis.

Wawancara :

- 1) Seberapa banyak kelompok sasaran yang telah dijangkau terhadap implementasi program penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa di kabupaten Pangkep?

Jawab :

“Jika membicarakan berhasilnya program ini, saya belum dapat mengatakan iya atau tidak. Saya hanya bisa mengukur bahwa dana yang disiapkan oleh pemerintah sudah tersentuh ke mahasiswa. Tujuan program ini kan salah satunya untuk meringankan beban orang tua, kita tidak tahu apakah mahasiswa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia menerima bantuan. Jadi kita tidak tahu apakah betul meringankan beban orang tua.”

- 2) Seberapa mudah pelayanan dapat dijangkau oleh mahasiswa yang menjadi sasaran beasiswa?

Jawab :

“Sangat mudah apalagi banyak mahasiswa yang datang untuk menanyakan sampai kapan batas pengumpulan proposal dan apa-apa yang dibutuhkan”

- 3) Mengapa pelaporan penggunaan dana bantuan juga bertentangan dengan apa yang tertera di petunjuk teknis yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program ini?

Jawab :

“Dulu pernah ditanyakan oleh BPK bahwa kenapa tidak ada pelaporan dari pihak kampus maupun mahasiswa mengenai penggunaan dananya karena mereka langsung menerima dana di bank dan tidak kembali untuk melaporkan.”

4) Apakah orang tua mengetahui tentang beasiswa (SPP) ini?

Jawab :

“Ada beberapa orang tua yang pergi ke dinas pendidikan untuk menanyakan tentang kejelasan program Bantuan SPP Gratis ini kepada pelaksana dan mereka mendapat informasi tersebut berdasarkan pengumuman yang di dengar melalui masjid.”

3. Informan III

Nama : Dra. Hasnawati,M.Pd

Umur : 48 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Minasa'tene

Ibu Hasna jabatannya merupakan Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah dan sebagai salah satu yang mengurus program beasiswa (SPP)gratis.

Wawancara :

1) Apakah program penyaluran beasiswa (SPP) gratis dapat meningkatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi?

Jawab :

“Untuk meringankan beban orang tua, kemudian yang kedua supaya mengurangi angka putus sekolah karena dari 4000 siswa SMA yang tamat, biasanya hanya 700 yang lanjut. Makanya pemerintah memberikan bantuan agar mahasiswa banyak yang melanjutkan pendidikannya.”

2) Apakah ada beasiswa, selain beasiswa SPP yang deprogram oleh Bupati Pangkep terhadap mahasiswa?

Jawab :

“Ada lima orang wartawan yang mengambil pendidikan profesi di UNM mendapat dana bantuan karena ada kerjasama dengan bupati. Selain itu, ada mahasiswa yang kuliah di Cina dan ada juga mahasiswa S3 yang mendapat dana bantuan, mereka semua memasukkan proposal yang ditujukan langsung kepada Bupati. Memang dulu banyak dana sedangkan mahasiswa penerima kurang jadi disetujui oleh Bupati dan ada mahasiswa yang lulus di cina tapi terkendala oleh biaya jadi bermohon ke dinas pendidikan, kemudian kita arahkan untuk bermohon ke Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati menyetujui jika masih ada dana, maka nya kami proses karena masih ada dana 20 juta.”

- 3) Bagaimana ketepatan waktu dalam implementasi program (SPP) gratis sehingga dapat tepat penggunaannya oleh mahasiswa yakni membayar (SPP)?

Jawab :

“Waktu pelaksanaan program ini memang lambat karena biasanya ketika kita mau minta tanda tangan MoU kepada pihak kampus, yang bersangkutan tidak ada dan harus menunggu lagi sampai yang bersangkutan hadir. Mungkin karena tidak adanya batasan waktu yang diberikan makanya prosesnya menjadi lambat dan ada tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak serta merta langsung cair. Ada banyak prosedur yang harus dilalui. Waktu penerimaan proposal, para pegawai sampai begadang di kantor untuk memilah dan mengelompokkan setiap angkatan dan mengelompokkan sesuai jumlah SPP. Untuk meminta tanda tangan setiap kampus dan Pak Bupati juga tidak mudah dan tidak langsung bisa selesai.”

- 4) Bagaimana hubungan antarorganisasi antarpemerintah pada saat aktivitas pelaksanaan terhadap program ini?

Jawab :

“Komunikasi awal yang dilakukan melalui surat yang dibawa oleh pihak dinas pendidikan. Jadi kita mengirim semua nama anak Pangkep dengan

melampirkan data-data yang dibutuhkan, dalam proses ini pun tak lepas dari peran aktif dari Kerukunan Mahasiswa Pangkep (KMP) dan untuk menyampaikan informasi mengenai SPP Gratis, kita mengirim surat ke setiap kampus bahwa ada beasiswa dari Bupati, selain ke setiap kampus kita juga mengirim surat ke kantor-kantor lurah atau desa di Kabupaten Pangkep.”

- 5) Ketidakjelasan informasi yang di berikan oleh pihak pelaksana berdampak pada banyaknya mahasiswa yang tidak lagi mendapat dana bantuan?

Jawab :

“Banyak mahasiswa yang menerima pada tahun 2015 tapi tidak menerima pada tahun 2016 mungkin karena mereka menganggap bahwa namanya sudah ada di dinas pendidikan dan tidak perlu memasukkan proposal, padahal harus memasukkan proposal makanya banyak yang tidak menerima.”

- 6) Kenapa bisa terjadi ada mahasiswa yang tidak pernah mendapat dana bantuan sama sekali padahal sudah memasukkan proposal?

Jawab :

“Tidak tau kenapa bisa. Ini kan begini, ketika masuk tahap verifikasi, jadi data nama-nama mahasiswa kita kasi ke Perguruan Tinggi. Jika kasi masuk proposal tapi namanya tidak tercantum maka disuruh ke Diknas melapor sebelum SKpenerima ditandatangani oleh Pak Bupati. Jadi kemungkinan mahasiswa yang memasukkan proposal tapi tidak mendapat dana bantuan, mereka tidak melapor atau mengecek namanya di Diknas.”

4. Informan IV

Nama : Sulkifli, S.Pi M.Si

Umur :49 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Labakkang

Pak Sulkifli selaku wakil direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pangkep dan sebagai salah satu yang pengamat proses program beasiswa (SPP) gratis.

Wawancara :

Apakah bapak mengetahui adanya beasiswa SPP gratis ini?

Jawab :

SPP gratis, sesuai dengan yang dibayarkan oleh mahasiswa, ada memang yang menjadi SPP itu kelas khusus seperti kedokteran. Berdasarkan kriteria pemberian. Kan namanya SPP gratis jadi yang dibayarkan adalah SPP itu, berapapun SPPnya akan dibayarkan.”

5. Informan V

Nama : Wahyuni,SP.d

Umur : 28 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Minasa'tene

Ibu Wahyuni sebagai salah satu pengawai bagian Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pangkep yang mendapatkan informasi tentang beasiswa (SPP) gratis.

Wawancara :

Apakah informasi penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah sampai ke pihak kampus?

Jawab :

“Iya sudah sampai, tapi informasi yang di berikan biasanya tidak jelas jadi pihak dari kampus selalu menghubungi kantir dinas untuk mengetahui bagaimana sistem beasiswa itu jadi mahasiswa kami mendapatkan beasiswa (SPP) ini.”

6. Informan VI

Nama : Jummiati Ramli

Umur : 21 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Bungoro Indah

Ramli merupakan salah satu mahasiswa semester 6 UMI jurusan sastra Inggris dan merupakan mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa (SPP) Gratis.

Wawancara :

Bagaimana pelayanan pegawai terhadap penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa?

Jawab :

“pelayanannya ramah, baik serta terstruktur setiap angkatan beda yang melayani.”

7. Informan VII

Nama : Sri Islamiyah Ramli

Umur : 22 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Matahari

Putri merupakan salah satu mahasiswa semester 8 kuliah di UNISMUH jurusan Pendidikan Matematika dan merupakan mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa (SPP) Gratis.

Wawancara :

Bagaimana pelayanan pegawai terhadap penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa?

Jawab :

“pelayanan yang di berikan pengawai Dinas Pendidikan lumayan bagus.”

8. Informan VIII

Nama : Hartina

Umur : 22 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Sukawati

Tina merupakan salah satu mahasiswa semester 8 kuliah di UNM jurusan Penjaskesrek (Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi) merupakan mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa (SPP) Gratis.

Wawancara :

Bagaimana informasi yang di berikan oleh Dinas Pendidikan terhadap penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa?

Jawab :

“Informasi yang di berikan oleh Dinas Pendidikan kepada mahasiswa tidak jelas apalagi berkas-berkas yang dikumpul dan informasinya dari mulut ke mulut, biasanya berbeda dari mulut A ke mulut B.”

9. Informas IX

Nama : Muh Faisal

Umur : 22 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl Jagong

Muh. Faisal merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan (Ketua IPPM Kord. Unismuh) merupakan mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa (SPP) Gratis.

Wawancara :

Bagaimana informasi yang di berikan oleh Dinas Pendidikan terhadap penyaluran beasiswa (SPP) gratis bagi mahasiswa?

Jawab :

“Konsistensi informasi yang di berikan kepada mahasiswa kurang memuaskan karena adanya informasi yang berubah-ubah dari Dinas Pendidikan selaku pihak penyelenggara program ini.”

Nama Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Tabel 4.8 Daftar nama pegawai Dinas Pendidikan

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan
1	Drs.Muhammad Idris, MM Nip 19720101 199203 1 018	IV/a	Plt.Kepala Dinas
2	Muslimah Yusuf ,S.Pd Nip 19720223199501 1 001	IV/a	Sekretaris
3	Nurul Haq, S.Pi, M.Si Nip 19700524 200801 1 004	III/c	Kabid Pendidikan Dasar
4	M Arief Hamsah, S.Sos, M..Adm. SDA Nip 19620611 199103 1 003	IV/a	Kabid Pendidikan Sekolah Menengah
5	Dra. Hj. Sitti Aminah, MM Nip 19621120 198303 2 013	IV/a	Kabid Pendidikan PAUD & Pendidikan Non Formal
6	Dra. Husnawaty Nip 19720909 199303 1 004	III/c	Kabid Pembinaan GTK
7	Muhammad Fitri Mubarak, S.Sos Nip 19720909 199303 1 004	III/b	Kasubag Umum & Kepengawain Sekretariat
8	Awaluddin, S.Pd Nip 19811210 200604 1 011	III /b	Kasubag Perencanaan & Pelapor Sekretariat

9	Idris,S.Sos Nip 19680303 198903 1 019	III/c	Kasubag Keuangan Sekretariat
10	Bakhtiar, S.Sos, M.Si Nip 19711231 199303 1 024	III/c	Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana Bidang Pendedidikan Sekolah Dasar
11	Mashuddin, S.Sos Nip 19700102 199403 1 014	III/b	Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
12	Rukmini, S.Pd, M. Pd Nip 19700605 198301 1006	III/d	Kasi Manajemen & Kesiswaan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
13	H. Rizal Syarief, S.Sos, M.Si Nip 19590703 198301 1 006	III/d	Kasi Manajemen & Kesiswaan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
14	A. Syamsuddin, S.Sos Nip 19660827 200701 1 017	III/b	Kasi kelembagaan & Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
15	Fatmawati, S.Pd	III/b	Kasi Kurikulum &

	Nip 198508006 201001 2 037		Penilaian Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
16	Fatimah, S.H Nip 19850806 201001 2 037	III/b	Kasi Kurikulum & Penilaian Bidang Pendidikan PAUD & Pendidikan Non Formal
17	Hj. Milhana, S.E Nip 19650921 198703 2 010	III/d	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bid Pendidikan Non Formal
18	Dra. Sitti Arah Nip 19670329 200801 2 003	III/c	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bid Pendidikan PAUD & Pendidikan Non Formal
19	Andi Haslinah, AB Nip 19730107 200003 2 002	III/d	Kasi GTK Bid Pendidikan PAUD & Pendidikan Non Formal
20	Syamsir Palisuri Sua, S.E Nip 19770208 200902 1 002	III/b	Kasi GTK Sekolah Dasar
21	Hairuddin Ishak, S.Pd,M.Pd Nip 19710403 199603 1 007	IV/a	Kasi GTK Sekolah Menengah
22	Drs. Silmi Djafar	IV/b	Fungsional Umum

	Nip 1960021 198703 1 009		Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
23	Hj. Nurhayati, S.Sos Nip 19690502 199003 2 008	III/c	Fungsional Umum Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
24	Abbas Nip 19610420 198511 1 001	III/c	Fungsional Umum Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
25	Ulfah Mutmainna Wahab, S.E Nip 19810429 200801 2 013	III/c	Fungsional Umum Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
26	Sitti Kurnia Ali, A.Md Nip 19751210 200701 2 022	III/a	Fungsional Umum Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
27	Asri Latif Nip 19751210 200701 2 022	III A	Fungsional Umum Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
28	Mukti	II/a	

	Nip 19780914 199002 2 004		
29	Hj.Harlina Hamid, S.E Nip 19670416 199002 2 004	III/d	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
30	Hj. Sugaya Nip 19670416 199002 2 004	III/b	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
31	Amaluddin, S.E Nip 19701106 199802 1 006	III/d	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
32	Hj.Rosniah Nip 19650806 198903 2 019	III/b	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
33	Muh. Takdir Ramli, S.E Nip 19800507 201001 2 020	III/b	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
34	Mariyam Ashaniais, A.Md Nip 19870523 201001 2 020	II/c	Fungsional Umum Subag Umum dan

			Keuangan Sekretariat
35	Nursalam Nip 19691130 200604 1 007	II/d	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
36	Harlina Munir Nip 19820819 201001 2 031	II/b	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
37	H. Amar Ma'ruf Nip 19681027 199002 1 001	III/c	Fungsional Umum Subag Umum dan Keuangan Sekretariat
38	H. Haeruddin K,S.Sos, M.Si Nip 19650424 199203 1 018	IV/a	Fungsional Umum Subag Umum dan Pelapor Sekretariat
39	Nurbayati, SS Nip 19750607 200701 2 045	III/c	Fungsional Umum Subag Umum dan Pelapor Sekretariat
40	Hukmiyah Wangsa, SP	III/c	Fungsional Umum

	Nip 196805010 200701 2 045		Subag Umum dan Pelapor Sekretariat
41	Muh Resha Irawan, S.Kom Nip 196801023 201101 1 002	III/b	Fungsional Umum Subag Umum dan Pelapor Sekretariat
42	Nurdaikah M, S.H Nip 19680102 200801 2 009	III/b	Fungsional Umum Subag Umum dan Pelapor Sekretariat
43	Darwis Nip 196512231 198602 1 051	I/c	Fungsional Umum Subag Umum dan Pelapor Sekretariat
44	Drs. H. Ilham, MM Nip 19660318 199303 1 008	IV/b	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
45	Suhartiyah, S.S, M.Si Nip 19791119 2011101 2 006	III/c	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
46	A Bustanil Arifin Nip 19801515 200701 1 018	III/a	Fungsional Umum Bidang Pendidikan

			Sekolah Dasar
47	Fitriani Ali, S.Sos Nip 19770913 200701 2 016	III/a	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
48	Muhammad Adil, S.E, M.Si Nip 19860407 200801 1 013	III/b	Fungsional Umum Bidang Pembinaan GTK
49	Syajeraeni Syam, S.E, M.Si Nip 19830417 201001 2 035	III/b	Fungsional Umum Bidang Pembinaan GTK
50	Citra Nurani Ali, A.Md Nip 19830417 201001 2 027	II/d	Fungsional Umum Bidang Pembinaan GTK
51	Dra. Hasdirah Nip 199651231 1999003 2 048	IV/a	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
52	Hj.Nuraeni ,S.Pd Nip 19630523 198903 2 014	III/c	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
53	Hj. Rosmini Djarre Nip 19680606 19930 2 007	III/b	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
54	Dra. Hasnawati, M.Pd Nip 19690422 199403 2 010	IV/a	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
55	Hj. Rahmatilah, S.Sos	III/b	Fungsional Umum

	Nip 19680606 199303 2 004		Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
56	Andi Nurjannah, S.Pd Nip 19691230 199803 2 005	III/b	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
57	Daya Nip 19801020 200903 2 005	II/c	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
58	Yugi Nip 19800610 200801 2 019	II/b	Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah
59	Jumriah, S.E Nip 19770401 200801 2 019	III/b	Fungsional Umum Bidang PAUD & Pendidikan Non Formal
60	Fatmawaty, S.E Nip 19700629 200801 2 008	III/b	Fungsional Umum Bidang PAUD & Pendidikan Non Formal
61	Halwani, S.Sos Nip 19750831 201001 2 003	III/a	Fungsional Umum Bidang PAUD & Pendidikan Non Formal
62	A Nidia Alfatih, S. Sos Nip 19830616 201001 2 036	III/b	Fungsional Umum Bidang PAUD & Pendidikan Non Formal

63	Widarti Nip 19831016 201001 2 020	II/c	Fungsional Umum Bidang PAUD & Pendidikan Non Formal
----	--------------------------------------	------	---

Sumber : Absensi harian pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.

RIWAYAT HIDUP



Mahgira Fitri Maulani. Dilahirkan di Bungoro pada tanggal 14 Juni 1995 anak keempat dari empat bersaudara pasangan dari Ayahanda Abidin Majid dan Ibunda Agustina Rahman. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Lejang di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2008.

Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Pangkajene dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pangkajene pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi.